

**PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
TERHADAP KINERJA KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA**

***THE EFFECT OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES OF
FINANCIAL PERFORMANCE ON NON-PROFIT ORGANIZATION***

**KEMAL SUPRIANDI
8335098152**



**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**


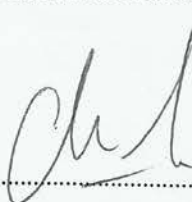



**PROGRAM STUDI S1
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2013**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi



Dra. Nurahma Hajat, M.Si.
NIP. 19531002 198503 2001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Yunika Murdayanti, SE, M.Si</u> NIP. 19786021 200801 2 011	Ketua		4 Juli 2013
<u>Choirul Anwar, MBA, MAFIS, CPA</u> NIP. 19691004 200801 1 010	Sekretaris		9 Juli 2013
<u>Tresno Eka Jaya, SE, M.Ak</u> NIP. 19741105 200604 1 001	Penguji Ahli		9 Juli 2013
<u>Unggul Purwohedji, SE, M.Si, Ph.D.</u> NIP. 19790814 20064 1 002	Pembimbing I		28 Juni 2013
<u>Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak.</u> NIP. 19770617 200812 2 001	Pembimbing II		4 Juli 2013

Tanggal Lulus: 26 Juni 2013

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan Karya Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi Negeri lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 10 Juli 2013

Kemal Supriandi



ABSTRAK

Kemal Supriandi, 2013: Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi Nirlaba. Dibimbing oleh; Unggul Purwohedi, SE, M.Sc, Ph.D, Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak.

Tuntutan akan akuntabilitas bagi organisasi nirlaba dewasa ini menguak. Hal ini disebabkan banyak dari organisasi nirlaba tidak transparan dalam mengelola sumber daya finansialnya. Tata kelola sebuah organisasi yang baik dapat dicapai jika setidaknya menerapkan prinsip-prinsip good governance 3 diantaranya adalah Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Penelitian ini ingin menguji adakah pengaruh antara Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap kinerja dari organisasi nirlaba.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik yang digunakan untuk memperoleh sampel yaitu purposive sampling. Sampel dari penelitian ini adalah organisasi nirlaba yang berada di Jakarta. Objek penelitian berjumlah 18 Organisasi nirlaba dengan total responden mencapai 40 orang. Hipotesis dari penelitian ini di uji dengan menggunakan metode analisis SEM berbasis Partial Least Square (PLS). Pengujian dengan PLS dilakukan melalui uji outer model (validitas dan reabilitas) dan inner model (uji model).

Hasil dari penelitian ini adalah hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variabel akuntabilitas dengan kinerja organisasi nirlaba (NGO) menunjukkan nilai koefisien jalur 0.886354 dengan nilai t sebesar 4.556714 dengan nilai t diatas 1,96 maka hipotesis pertama diterima. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hubungan variabel akuntabilitas dengan kinerja organisasi nirlaba (NGO) menunjukkan nilai koefisien jalur -0.224188 dengan nilai t sebesar 1.082192. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai t tabel (1,96) hipotesis kedua ditolak. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hubungan variabel akuntabilitas dengan kinerja organisasi nirlaba (NGO) menunjukkan nilai koefisien jalur 0.022648 dengan nilai t sebesar 0.114514. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai t tabel (1,96) hipotesis ketiga ditolak.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hanya akuntabilitas yang berpengaruh terhadap kinerja dari organisasi nirlaba. Jadi, jika suatu organisasi nirlaba mempunyai akuntabilitas yang baik maka dengan sendirinya kinerja dari organisasi nirlaba tersebut juga akan baik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, kinerja Organisasi nirlaba, Partial Least Square (PLS).

ABSTRAK

Kemal Supriandi, 2013: The Effect of Applying the Principles of Good Governance on Performance Nonprofit Organizations. Guided by; Unggul Purwohedi, SE, M.Sc, Ph.D, Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak.

Demands for accountability for nonprofit organizations today reveals. This is due to a lot of non-profit organizations are not transparent in managing their financial resources. Governance of an organization that could be achieved if at least apply the principles of good governance, 3 of them are Accountability, Transparency and Participation. This study wanted to test there any influence between Accountability, Transparency and Participation on the performance of non-profit organizations.

The research method used is descriptive quantitative research methods. Techniques that are used to obtain a sample that is purposive sampling. Sample of this study is a non-profit organization located in Jakarta. Object of study were 18-for-profit organization with a total respondents reached 40 people. The hypothesis of this study is tested using SEM analysis method based on Partial Least Square (PLS). Testing is done through testing the PLS outer model (validity and reliability) and the inner model (test model).

Results from this study is the first hypothesis suggests that the relationship with performance accountability variable profit organization (NGO) shows the path coefficient t value of 0.886354 to 4.556714 with t values above 1.96, the first hypothesis is accepted. The second hypothesis testing results show that the relationship with performance accountability variable profit organization (NGO) shows the path coefficient value -0.224188 with a t value of 1.082192. This value is smaller than the table value of t (1.96) The second hypothesis was rejected. The third hypothesis testing results show that the relationship with performance accountability variable profit organization (NGO) shows the path coefficient t value of 0.022648 to 0.114514. This value is smaller than the table value of t (1.96) The third hypothesis is rejected.

Hypothesis testing results showed that the only accountability that affect the performance of the non-profit organization. So, if a non-profit organization has a good accountability is by itself the performance of the non-profit organizations will also be good.

Keywords: Accountability, Transparency, Participation, a non-profit organization performance, Partial Least Square (PLS).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannerrohim.

Alhamdulillah puji syukur praktikan panjatkan kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam semoga tercurah atas diri Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya

Atas izin,rahmat dan karunia Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba”**. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Keberhasilan menyelesaikan proposal skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan moril maupun materil.
2. Teman-teman S1 Akuntansi Non-Reguler 2009 yang senantiasa saling membantu agar rampungnya skripsi ini.
3. Kerabat yang selalu memberi dorongan agar skripsi ini selesai tepat waktu.
4. Dra. Nurahma Hajat, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
5. Bapak Unggul Purwohedhi, SE, M.Si, PhD dan Ibu Nuramalia Hasanah, Se, M.Ak yang senantiasa membimbing agar penelitian ini dapat selesai dengan baik.
6. Seluruh dosen FE UNJ yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis duduk dibangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga proposal skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Juli 2013

Peneliti

DAFTAR ISI

Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Orisinalitas	iii
Abstrak Indonesia	iv
Abstrak Inggris	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	8
2.1 Kajian Pustaka	8
2.1.1 Organisasi Sektor Publik (Pemerintah dan Nirlaba).....	8
2.1.1.1 Sifat Organisasi Nirlaba.....	10
2.1.1.2 Organisasi Nonlaba Non-Pemerintah	11
2.1.1.3 Prinsip Akuntansi Organisasi Nirlaba	11
2.1.1.4 Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.....	12
2.1.2 Teori Stewardship	13
2.1.3 Teori Stakeholders	15
2.1.4 Good Governance (Tata Kelola yang Baik).....	16
2.1.5 Kinerja Organisasi Nirlaba.....	20
2.1.6 Akuntabilitas	23
2.1.7 Transparansi	25
2.1.8 Partisipasi Masyarakat	26
2.2 Review Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Kerangka Pemikiran	41
2.3.1 Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi Nirlaba	41

2.3.2	Transparansi dan Kinerja Organisasi Nirlaba	42
2.3.3	Partisipasi dan Kinerja Organisasi Nirlaba	42
2.4	Hipotesis	42
BAB III	OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1	Objek dan Ruang Lingkup Penelitian.....	42
3.2	Metode Penelitian	42
3.3	Operasionalisasi Variabel Penelitian	43
3.3.1	Akuntabilitas.....	43
3.3.2	Transparansi.....	45
3.3.3	Partisipasi.....	45
3.3.4	Kinerja Organisasi Nirlaba	46
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	47
3.5	Teknik Penentuan Populasi dan Sampel.....	48
3.6	Metode Analisis	48
3.6.1.	Statistik Deskriptif	48
3.6.2.	Uji Hipotesis	49
3.6.3.	Model Spesifikasi	50
3.6.4	Outer Model.....	56
3.6.5	Inner Model	57
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1	Deskripsi Unit Analisis.....	59
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	61
4.2.1	Menilai Outer Model atau Measurement Model.....	61
4.2.1.1	Statistik Deskriptif.....	64
4.2.1.2	Discriminant Validity	66
4.2.1.3	Mengevaluasi Reliability dan Average Extracted (AVE)	69
4.2.2	Pengujian Model Struktural (Inner Model).....	70
4.2.3	Pengujian Hipotesis	73
4.2.3.1	Pengujian Hipotesis 1	74
4.2.3.2	Pengujian Hipotesis 2	74
4.2.3.3	Pengujian Hipotesis 3	75
4.3	Pembahasan	75
4.3.1	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja NGO	75

4.3.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja NGO	76
4.3.3 Pengaruh Partisipasi Terhadap Kinerja NGO	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Keterbatasan Penelitian	79
5.3 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

Daftar Tabel

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Perbedaan Karakteristik Organisasi Nirlaba dengan Perusahaan komersial	10
2.2	<i>Review</i> Penelitian Terdahulu	27
3.1	Model Spesifikasi	65
4.1	Daftar Distribusi Kuesioner	73
4.2	Jenis Kelamin	74
4.3	Lama Bekerja	74
4.4	<i>Outer Loading</i>	76
4.5	Statistik Deskriptif	78
4.6	Nilai <i>Discriminant Validity</i>	80
4.7	<i>Latent Variable Correlation</i>	82
4.8	AVE dan Akar AVE	82
4.9	<i>Composite reliability</i> dan AVE	83
4.10	Nilai R-Square	85
4.11	Total Effect Total Effects (Mean, STDEV, T-Values)	86

Daftar Gambar

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran	40
3.1	Model Analisis Jalur	70
4.1	Model Struktural	84

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Kuesioner
Lampiran 2	Daftar Organisasi
Lampiran 3	Model Struktural Sebelum Modifikasi
Lampiran 4	Model Struktural Setelah Modifikasi
Lampiran 5	Tabulasi Data
Lampiran 6	Overview
Lampiran 7	Outer Loading
Lampiran 8	Total Effect
Lampiran 9	Blindfolding

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konsep *governance* dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep *government* – yang menjadi titik tekan paradigma tradisional – dan menyempurnakan konsep-konsep yang diusung oleh paradigma *New Public Management* (NPM). Dalam konsep *government*, Negara merupakan institusi publik yang mempunyai kekuatan memaksa secara sah yang merepresentasikan kepentingan publik (Pratikno, 2004). *Governance* lebih merupakan kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni: pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta (Taschereau dan Campos, 1997 dalam Thoha, 2003).

Pengungkapan informasi keuangan dewasa ini sangat penting bagi perusahaan publik. Pengungkapan laporan keuangan kepada publik dimaksudkan sebagai alat akuntabilitas dan transparansi dari perusahaan tersebut kepada para pengguna informasi keuangan.

Pada saat sekarang ini pengguna informasi keuangan tidak hanya berasal dari para investor perusahaan swasta saja. Dalam sektor pemerintahan pengungkapan laporan keuangan juga perlu digunakan untuk memberikan informasi pada publik. Hal ini mengacu pada prinsip-prinsip *good governance* yaitu tranparansi, akuntabilitas serta efisiensi dan efektivitas terhadap publik. Oleh karena itu baik perusahaan swasta maupun organisasi nirlaba harus memandang

good governance bukan sebagai suatu kata-kata saja, namun harus dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan atau instansi tersebut. (Tjager, 2003)

Pada sektor swasta, isu *good governance* menjadi keharusan bagi perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi prinsip tersebut. Dalam sektor swasta, *good corporate governance* menjadi bagian dari manajemen dan karakter suatu perusahaan. Perusahaan lebih berorientasi pada kepuasan dan perlindungan terhadap konsumen, selain efisiensi dan manajemen yang transparan.

Penerapan *good governance* pada organisasi non-profit juga menjadi hal yang penting. Walaupun wacana atau tuntutan akan *good governance* tidak sekuat pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pada organisasi non-profit berasal dari para donator-donatur organisasi tersebut.

Menurut *World Bank* Organisasi nirlaba baik LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ataupun *NGO (Non-Governmental Organization)* adalah organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat.

Salah satu yang menjadi persoalan bagi *NGO* dewasa ini adalah keberlanjutan dari organisasi tersebut. Persoalan ini muncul karena sumber pemasukkan *NGO* berasal dari donasi-donasi para donator (*funder*). Hal ini terjadi karena *NGO* masih bergantung pada hibah dan hutang luar negeri. Penelitian Ibrahim (2000) pada 25 organisasi sedikit menggambarkan komposisi

ini. Meskipun, perlu dicatat di sini, responden yang disurvei adalah organisasi yang masuk dalam kategori Organisasi Sumber daya Sipil (OSMS), dan bukan sepenuhnya LSM. Karenanya data yang tersedia ini lebih menggambarkan sumber dana yang diterima oleh organisasi OSMS dan LSM maupun lembaga dana. Dari penelitian ini terlihat mayoritas masih mengandalkan sumber bantuan luar negeri yang mencapai 65%, dan sumber dalam negeri 35%. Secara lebih terinci sumber dalam negeri terutama adalah hasil usaha sendiri (33%), sumbangan perusahaan dan dana abadi (masing-masing 17%). Donasi individual menyumbang 14%. Sisanya dalam jumlah lebih kecil bersumber dari pemerintah (5%) dan sumbangan Ornop (3%), Dan sumber lainnya (11%). Sementara itu dalam beberapa tahun ini, ada kecenderungan aliran hibah itu berkurang. Sebabnya antara lain, situasi dunia yang terus berubah ikut mempengaruhi skala prioritas donator. Karena itu kalangan LSM/*NGO* perlu mulai menggalang dana alternatif, yang bukan sama sekali tidak ada, tetapi kontribusinya masih sangat kecil. Sumber alternatif ini beragam dari sumbangan perorangan sampai penjualan produk dan jasa yang terkait dengan misi lembaga¹.

Dari masalah sumber pendanaan tersebut munculah tuntutan mengenai transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dari good [governance](#). Tata kelola yang baik dapat dicapai suatu organisasi jika organisasi tersebut menjalankan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip tersebut antara lain adalah akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat.

¹ Zaim Saidi: “Lima Persoalan Mendasar Akuntabilitas LSM ”

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah dalam hal ini organisasi nirlaba untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah atau dalam hal ini adalah para donator (*principal*). Sedangkan transparansi dibangun untuk memberikan kebebasan kepada pengguna informasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam hal ini oleh para donator. Partisipasi masyarakat memberikan kebebasan masyarakat untuk turut mengawasi jalannya organisasi tersebut.

Terkait dengan sistem akuntabilitas publik, praktik akuntabilitas dan transparansi organisasi nirlaba tersebut memerlukan dukungan sistem akuntansi yang memadai. Selain kewajiban dokumentasi keuangan, dalam membuat ikhtisar laporan tahunan juga telah ditentukan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Standar akuntansi keuangan yang digunakan bagi organisasi nirlaba tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45).

Untuk mencapai sebuah *good governance* organisasi nirlaba harus dilakukan dengan akuntabel, transparan serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan terciptanya tata kelola organisasi nirlaba yang bagus maka lingkungan organisasi akan menjadi baik sehingga keselarasan tujuan antara *agent* dan *principal* sama-sama tercapai. Hasil dari tata kelola yang baik di organisasi nirlaba akan membuat para donatur merasa yakin atas tanggung jawab yang diberikan kepada organisasi tersebut sehingga pemberian donasi akan berlangsung lebih baik lagi.

Keselarasan tujuan antara agent dan principal akan membuat organisasi mengurangi konflik yang terjadi. Untuk mengurangi konflik yang terjadi ini, organisasi diminta untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola yang baik dibutuhkan organisasi guna menjaga kelangsungan organisasi tersebut. Dalam faktanya banyak organisasi nirlaba yang belum menjalankan prinsip tata kelola yang baik sehingga banyak dari LSM, yayasan maupun organisasi lainnya kehilangan kepercayaan. Dampak dari kehilangan kepercayaan oleh *funder* membuat banyak organisasi nirlaba tidak berumur panjang karena kehilangan sumber pendanaannya.

Terkait dengan hal tersebut semua, sudah sewajarnya organisasi nirlaba menerapkan *good governance* dalam kehidupan organisasinya. Hal ini akan membantu organisasi dalam memperoleh kepercayaan dari pendonor dana.

Oleh karena itu dari penjelasan yang sudah dijabarkan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui **“Pengaruh Prinsip-prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba”**.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagai sebuah pedoman dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya, untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan barang yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Indikator yang masih bertalian dengan sebelumnya adalah seberapa besar efisiensi pemanfaatan input untuk meraih keuntungan itu

dan seberapa besar efisiensi proses yang dilakukan untuk meraih keuntungan tersebut.

Good governance dalam sektor privat atau swasta sudah banyak digunakan dan menjadi hal wajib bagi suatu perusahaan untuk menggunakan tata kelola yang baik. Dalam sektor publik penggunaan *good governance* belumlah menjadi hal yang wajib. Banyak dari organisasi-organisasi non-profit belum menggunakan hal ini karena mereka berpikir tanggung jawabnya hanya kepada pemberi hibah atau pendonor saja. Banyak organisasi non-profit yang tidak bertahan lama umurnya. Masalah tersebut muncul karena pendonor kehilangan kepercayaan yang diakibatkan tata kelola yang buruk dari organisasi tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Organisasi Nirlaba?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja Organisasi Nirlaba?
3. Apakah Partisipasi berpengaruh terhadap kinerja Organisasi Nirlaba?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pada organisasi nirlaba.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pada organisasi nirlaba.

3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi terhadap kinerja pada organisasi nirlaba.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk Organisasi Nirlaba. Penelitian ini dapat membantu organisasi nirlaba untuk membuat tata kelola organisasinya menjadi lebih baik dan lebih mengutamakan prinsip-prinsip *good governance* tersebut.
2. Untuk Donatur. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk para donator untuk lebih bijak dalam mendonasikan dananya.
3. Untuk peneliti selanjutnya. Sebagai acuan untuk mengembangkan *good governance* di sektor publik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Organisasi Sektor Publik (Pemerintah dan Nirlaba)

Metode akuntansi dan pelaporan keuangan untuk setiap entitas nonlaba/nirlaba berbeda. Entitas nirlaba yang pertama didesain dan ditetapkan sebagai organisasi nonlaba pemerintahan atau non-pemerintahan. Meskipun setiap tipe organisasi nonlaba biasanya berfokus pada tujuan memberikan pelayanan jasa, namun sumber keuangan dan tingkat otonominya berbeda signifikan. Sebagian dari organisasi tersebut adalah organisasi pemerintahan, yang harus mengikuti aturan GASB (*Governmental Accounting Standard Board* atau Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan), sementara lainnya adalah organisasi nonlaba pemerintah yang mengikuti standar dari FASB (*Financial Accounting Standard Board* atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan).¹

Suatu organisasi pada dasarnya dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Organisasi Bisnis/Komersial (swasta)

Organisasi ini adalah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya bagi pemilik maupun pemegang sahamnya. Semakin besar laba yang didapatkan dari bisnis ini, dapat dibilang bahwa kinerja keuangannya bagus. Sehari-hari organisasi ini disebut sebagai perusahaan, baik perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan (CV), maupun

¹ Muindro Renyowijoyo, Akuntansi Sektor Publik

perseroan terbatas (PT). secara umum perusahaan ini dimiliki oleh satu orang maupun sekelompok orang.

2. Organisasi Non-Komersial

Organisasi ini tidak bertujuan untuk mendapatkan laba, biasanya kegiatannya lebih banyak berhubungan dengan aktivitas social dan pelayanan masyarakat. Contohnya adalah lembaga pemerintahan, partai politik, yayasan, sekolah, universitas, rumah sakit dan organisasi sejenis lainnya. Dari sudut pandang kepemilikan, organisasi ini dimiliki secara kolektif oleh masyarakat atau publik. Atas dasar itu organisasi ini dinamakan organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Lembaga Pemerintahan

Organisasi yang berhubungan dengan sub-kalsifikasi ini adalah organisasi pemerintahan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Secara operasional organisasi ini diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan kata lain organisasi ini dikelola oleh pemerintah dan dimiliki oleh masyarakat.

B. Lembaga Non-Pemerintahan (Organisasi Nirlaba)

Organisasi yang merupakan subklasifikasi ini adalah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat. Baik dalam bentuk yayasan, partai politik, organisasi profesi, maupun organisasi keagamaan. Secara operasional organisasi ini tidak mencari laba dan juga tidak diselenggarakan oleh pemerintah. Pengelolanya adalah orang-orang

yang dipercaya oleh masyarakat dan pemiliknya adalah masyarakat.

2

2.1.1.1 Sifat Organisasi Nirlaba

Perbedaan antara organisasi bisnis komersial dengan organisasi nirlaba dapat dinilai dari karakteristiknya. Berikut adalah perbedaan karakteristik organisasi nirlaba dengan perusahaan komersial.

Tabel 2.1

Perbedaan Karakteristik Organisasi Nirlaba dengan Perusahaan komersial

Not-For-Profit Entity	Commercial Business Enterprises
1. Menerima kontribusi sumber dana dalam jumlah signifika dari pemberi dana yang tidak mengharapkan pengembalian	1. Pemberi dana adalah pemilik atau kreditor yang mempunyai kepentingan untuk memiliki atau pengembalian tambah keuntungan atau bunga.
2. Beroperasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang bukan untuk mencari laba.	2. Menghasilkan barang dan jasa untuk menghasilkan laba
3. Pemberi dana tidak mempunyai kepentingan terhadap organisasi.	3. Pemberi dana mempunyai kepentingan untuk memiliki atau pengembalian dana.

Sumber: AICPA, *Audit and Accounting Guide, NFPOs*, (NY, 2002, par. 1.01) FASB., *Statement of Accounting Standards No. 116*

² Akuntansi Nirlaba Menggunakan Accurate

2.1.1.2 Organisasi Nonlaba Non-Pemerintah

Organisasi nonlaba non-pemerintah adalah entity nonlaba yang tidak ada hubungannya dengan elemen pemerintah. Semua organisasi nonlaba non-pemerintah esensinya menggunakan basis panduan yang sama, meskipun sifat dari transaksasinya berbeda. Terutama standar *FASB* yang memberikan panduan bagi entity tersebut, yaitu Pernyataan *FASB* nomor 116, “Akuntansi untuk penerimaan dan pembuatan kontribusi”, yang membuat standar-standar tentang kontribusi dan pernyataan nomor 117, *Financial Statements of non-for-profit Organization* tentang laporan keuangan untuk organisasi nirlaba, yang merupakan mengidentifikasi laporan keuangan yang harus dibuat oleh organisasi nonlaba pemerintah.

2.1.1.3 Prinsip Akuntansi Organisasi Nirlaba

Sampai tahun 1993, organisasi nirlaba menggunakan panduan prinsip akuntansi dan laporan keuangan dari *AICPA*. *AICPA* mempublikasikan empat panduan yang berhubungan dengan empat kategori organisasi nirlaba non-pemerintah. Pada awal tahun 1990-an, *FASB* mengambil prakarsa aktif membuat aturan dan standar-standar organisasi nirlaba, dengan mengeluarkan pernyataan no. 116 dan 117. Standar tersebut diterapkan kepada semua entity nirlaba non-pemerintahan, membantu standarisasi akuntansi dan laporan keuangan untuk sektor organisasi nirlaba. Lebih lagi *FASB* menerbitkan pernyataan no.124 dan 135 yang berhubungan dengan organisasi-organisasi nirlaba.

2.1.1.4 Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

FASB Statement no. 117 dan *PSAK No. 45* meminta organisasi nirlaba menyiapkan satu set laporan keuangan yang memuat laporan posisi keuangan (*Statement of financial position*), laporan aktivitas (*statement of activities*), laporan arus kas (*statement of cash flow*), dan catatan atas laporan keuangan (*notes*). Berikut akan dijelaskan laporan keuangan organisasi nirlaba.

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan melaporkan aset, hutang dan aset bersih.

Laporan aset bersih dalam total dan perincian tiga kelas aset bersih (aset tak bersyarat, bersyarat temporer, dan bersyarat permanen). Jumlah aset bersih bersyarat permanen dan aset bersih bersyarat temporer dinyatakan dalam neraca atau dalam catatan yang mana yang akan dipilih. Aset yang diterima dari donor dengan syarat untuk tujuan jangka panjang harus dipisahkan dari aset yang boleh digunakan sekarang.

2. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas menyajikan laporan bagaimana sumber daya digunakan untuk berbagai program dan pelayanan. Akuntansi organisasi nirlaba untuk pendapatan dan biaya menggunakan basis akrual. Laporan aktivitas berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Laporan ini melaporkan perubahan dalam aset bersih, saldo akhir aset bersih, harus sama dengan saldo aset bersih dalam neraca. Laporan ini juga

menyatakan pendapatan, biaya, keuntungan dan kerugian kelas aset bersih.

3. Laporan Arus Kas

Statement no. 117 memperluas *FASB statement no. 95* tentang “*Statement of Cash Flows*”, untuk organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba menggunakan klasifikasi dan definisi yang sama dengan perusahaan bisnis, kecuali deskripsi *Financing Activities* (Aktivitas Pendanaan) diperluas dengan memasukkan sumber daya dari donor yang dibatasi untuk tujuan jangka panjang. Laporan arus kas tentang *permanently endowments* (dana abadi) nirlaba dilaporkan sebagai aktivitas investasi. Dalam menyusun laporan arus kas, tidak boleh menggabungkan kas yang dibatasi untuk tujuan jangka panjang dengan kas yang didapat untuk penggunaan sekarang dalam neraca.

Berdasarkan penjelasan diatas kita dapat melihat bahwa karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utamanya adalah pada saat organisasi tersebut memperoleh sumber daya. Organisasi bisnis memperoleh sumber daya dari modal pemilik, hutang, atau dari pemegang saham. Sementara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan masyarakat baik mengikat maupun tidak mengikat.

2.1.2 Teori Stewardship

Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku, perilaku manusia (*behavior*), pola manusia (*model of man*), mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang

mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting bagi sebuah pencapaian tujuan.

Stewardship (suatu sikap melayani), merupakan suatu pandangan baru tentang mengelola dan menjalankan organisasi, suatu pergeseran pendekatan pada konsep kepemimpinan dan manajemen yang ada sekarang dari konsep mengendalikan (*control*) dan mengarahkan, kearah konsep pengaturan, kemitraan dan kepemilikan secara bersama oleh anggota tim dalam organisasi, yang merasa organisasi menjadi sesuatu miliknya ataupun suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri.

Teori *stewardship* ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari teori *stewardship* adalah pengelola meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Pengelola akan berperilaku sesuai dengan kesepakatan dan kepentingan bersama. Ketika terjadi benturan antara kepentingan dua pihak tersebut, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan tujuan individu. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup. Untuk mempraktikkan pendekatan ini, kunci utama terletak

pada *principal*, apakah *principal* benar-benar dapat meyakini dan mempercayai *steward* yang dipilihnya dalam membangun kemitraan organisasi tersebut.³

Suatu organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada profit atau keuntungan. Organisasi seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Yayasan, dan organisasi nirlaba lainnya mempunyai tujuan yang diciptakan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan individunya. Dalam organisasi nirlaba, yang menjadi *principal* adalah pendonor atau *funder*. Sementara yang menjadi *agent*-nya adalah mereka yang mempunyai tujuan yang sama seperti tujuan dari *funder* itu sendiri.

Dalam teori *stewardship* dijelaskan bahwa kinerja organisasi yang baik adalah organisasi yang didalamnya terdapat kesamaan tujuan, sehingga terhindar dari konflik-konflik internal. Teori ini menyebutkan bahwa kesuksesan kinerja sebuah organisasi dapat dilihat dari kesuksesan organisasinya. Ketika suatu *agent* organisasi mempunyai tujuan dan kepentingan yang sudah berjalan berdampingan dan lurus dengan apa yang diinginkan oleh *principal* maka konflik-konflik yang akan mengganggu tercapainya tujuan tersebut dapat dihindari. Ketika konflik dapat dihindari dan tujuan dari organisasi tercapai, menunjukkan bahwa organisasi ini mempunyai tata kelola yang baik (*good governance*).

2.1.3 Teori Stakeholders

Teori *stakeholders* menekankan kepada manajemen untuk melakukan aktivitasnya dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*. Freeman (1984), menjelaskan teori *stakeholders* adalah dimana suatu perusahaan harus peduli

³ Arfan & Herkulanus. "Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma"

dengan kepentingan *stakeholders* ketika membuat keputusan strategis. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa sekali lagi teori ini menjelaskan bahwa acuan pertimbangan para manajer dalam mengambil keputusan dan tindakan bukan semata-mata para pemegang saham, melainkan juga pihak lain mana pun yang terkena pengaruhnya.

Dalam *business dictionary*, *stakeholders* didefinisikan sebagai kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam sebuah organisasi karena dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan organisasi.

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tujuannya bukan untuk mencari laba/keuntungan melainkan untuk mencapai tujuan dari didirikannya organisasi tersebut. Teori *stakeholder* ini menjelaskan bahwa untuk setiap keputusan yang dibuat oleh manajemen haruslah mengutamakan *stakeholder*, karena hal ini menyangkut bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada *principal*.

2.1.4 Good Governance (Tata Kelola yang Baik)

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik. World Bank memberikan definisi *governance* sebagai: “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”.

Menurut dokumen *United Nations Development Program* (UNDP) yang dikutip oleh Renyowijoyo (2008: 18) mendefinisikan *governance* sebagai: “*the*

exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels". Selanjutnya menurut Nawangsih (2002), *good governance* merupakan *function of governing* salah satunya mengandung prinsip untuk memberikan pelayanan masyarakat yang baik oleh jajaran birokrasi dalam segala aspek kehidupan.

Menurut Krina P (2003: 7) *good governance* diartikan dengan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa. *Good governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien) dan (relatif) merata. Dengan berbagai pengertian yang dijelaskan sebelumnya, maka *good governance* merupakan suatu paradigma yang dituntut untuk diaplikasikan dalam suatu pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat serta pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sendiri.

Arti *good* dalam *good governance* sendiri mengandung 2 pengertian. Pertama adalah menjunjung tinggi keinginan /kehendak rakyat dan nilai-nilai yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan social. Kedua, merupakan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Didalam konsep *good governance* terdapat prinsip-prinsip yang berkembang. Prinsip-prinsip *Good Governance* itu sendiri telah banyak ditawarkan oleh berbagai kalangan, baik lembaga-lembaga internasional (UNDP

dan World Bank) maupun institusi nasional (Bappenas, Lembaga Administrasi Negara). UNDP menetapkan 8 prinsip, sebagai berikut: partisipasi, taat hukum, transparansi, responsive, kesetaraan, efektif & efisien, akuntabilitas dan visi strategik. Tampaknya konsep ini di adopsi oleh Indonesia, yang selanjutnya dikembangkan oleh Bappenas menjadi 14 prinsip, sebagai berikut: wawasan kedepan (visionary), keterbukaan dan transparansi (openness and transparency), partisipasi masyarakat (participation), tanggung gugat (accountability), supremasi hukum (rule of law), demokrasi (democracy), profesionalisme dan kompetensi (professionalism and competency), daya tanggap (responsiveness, efisien dan efektivitas (efficiency and effectiveness), desentralisasi (decentralization), kemitraan dengan dunia swasta dan masyarakat (private sector and civil society partnership), komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality), komitmen pada perlindungan hukum (commitment to environmental protection) dan komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market).

Prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP:

1. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. **Transparency.** Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh yang membutuhkan.
4. **Responsiveness.** Lembaga-lembaga public harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders.
5. **Consensus orientation.** Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. **Equity.** Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. **Efficiency and effectiveness.** Pengelolaan sumber daya public harus dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. **Accountability.** Pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktifitas yang dilakukan.
9. **Strategic vision.** Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Masyarakat transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indicator seperti: transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan serta kesinambungan. Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya consensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu *Accountability*, *transparency*, *predictability* dan *participation*.

Jelas dari penjelasan menurut beberapa lembaga bahwa paling tidak tidak ada 3 prinsip yang mendasari terciptanya sebuah tata kelola yang baik yaitu

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Prinsip-prinsip ini adalah landasan utama yang mendasari *good governance*. Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

2.1.5 Kinerja Organisasi Nirlaba

Kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. Kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah atau organisasi publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat *intangible output*, maka ukuran financial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial. (Mardiasmo:2002:122)

Mardiasmo (2002:123) menjelaskan pengukuran kinerja dibagi 2 yaitu dengan Informasi financial dan informasi nonfinansial. Penilaian laporan keuangan dengan informasi financial diukur berdasarkan pada anggaran yang

telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja actual dengan yang dianggarkan. Informasi nonfinansial dapat dijadikan tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah *Balance Scorecard*.

Untuk menilai kinerja organisasi diperlukan indikator-indikator pengukuran secara jelas. Banyak pendapat yang berbeda-beda dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Sebagai pedoman dalam menilai kinerja harus dikembalikan pada tujuan awal didirikannya organisasi.

Dalam organisasi sektor publik pengukuran kinerja tidaklah semudah di sektor swasta. Bila dilihat dari tujuan dibentuknya organisasi publik yaitu memenuhi kepentingan publik bukan untuk mencari keuntungan. Pengukuran kinerja sektor publik terlihat mudah, namun dalam kenyataannya banyak pendapat berbeda dalam pengukuran kinerja organisasi publik.

Dwiyanto, dkk (2002:48), mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik dapat diukur sebagai berikut :

- a. Produktivitas.
- b. Kualitas Layanan
- c. Responsivitas
- d. Responsibilitas

Sementara itu kumorotomo (1995) dalam Budi (2009) menyebutkan bahwa dalam mengukur organisasi digunakan indicator sebagai berikut:

1. Efisiensi. Menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan factor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi.
2. Efektivitas. Apakah tujuan dari pendirian organisasi tersebut telah tercapai? Hal tersebut erat hubungannya dengan organisasi rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan. Mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang dilakukan oleh organisasi publik.
4. Daya Tanggap. Berlainan dengan bisnis yang dilakukan organisasi swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap atau kebutuhan pemerintah atau Negara. Oleh karena itu kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Menurut Mardiasmo (2002;133) untuk mengukur kinerja suatu organisasi mencakup ekonomi, efisiensi dan efektivitas (*value for money*). Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan. Suatu kegiatan dikatakan ekonomis apabila dapat mengurangi atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang

digunakan. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas berhubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Organisasi dikatakan efektif bila tujuan dan sasaran tercapai.

Kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. Kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar.

2.1.6 Akuntabilitas

Mardiasmo (2002: 20) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangannuntuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan, Danin (2005: 7) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Ahdiyana (2008) menyimpulkan jika akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi atau aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan atau melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat. Krina P (2003: 10) menyebutkan akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi

kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances sistem*).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari pemegang amanah kepada pemberi amanah. Dalam menjalankan *good governance* peran akuntabilitas sangatlah penting guna menjaga legitimasi dari organisasi nirlaba. Apabila organisasi nirlaba kehilangan kepercayaan akan ke-akuntabilitasan mereka, para donator atau pemberi dana akan menghentikan aliran dana dan selanjutnya membuat kinerja dari organisasi nirlaba tersebut menurun.

Prinsip akuntabilitas menuntut 2 hal yaitu Prinsip ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Indikator dari prinsip akuntabilitas publik dibagi 2 tahapan yaitu⁴:

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
 - a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan

⁴ Dikutip dari secretariat good public governance (2003)

- b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders
 - c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku
 - d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi
 - e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
- a. penyebaran informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal
 - b. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program
 - c. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat
 - d. ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

2.1.7 Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*.

Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses

pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Coryanata, 2007). Kemudian Danin (2005: 7) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan. Krina P (2003: 15) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai. Selanjutnya, Krina P (2003: 15) juga menjelaskan bahwa prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu: (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.

Indikator dari transparansi publik ini adalah Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur biaya-biaya dan tanggung jawab, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa.

2.1.8 Partisipasi Masyarakat

UNDP menjelaskan bahwa prinsip-prinsip *good governance* dibagi menjadi 8 yaitu: *Participation, Rule of Law, Tranperancy, Responsive, Consesnsus Orientation, Equity, Efficiency and Effektiveness*. Dari kedelapan prinsip tersebut terdapat prinsip yang disebutkan paling pertama yaitu *Participation*. UNDP menjelaskan bahwa *participation* merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak

langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Partisipasi banyak menguntungkan bagi suatu organisasi nirlaba. Melalui partisipasi masyarakat, organisasi dapat membuat suatu akuntabilitas organisasi tersebut semakin baik. Dalam sektor publik ataupun pemerintahan, partisipasi masyarakat berperan penting. Achmadi (2002) dalam Cornyata (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam otonomi daerah karena dalam partisipasi terdapat aspek pengawasan dan aspirasi.

Krisna (2003) dalam Rita dkk (2011) menyebutkan bahwa partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas & Depdagri 2002, hal 20.)

Indikator dari partisipasi masyarakat menurut Sekretariat *Good Public Governance* adalah sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik
- b. Menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan-masukan dari stakeholders

- c. Mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan masyarakat dan layanan publik.

Dari penjelasan yang telah dijelaskan, partisipasi masyarakat merupakan keinginan dari masyarakat untuk diikutsertakan dan diberi kesempatan untuk mengikuti proses-proses yang berhubungan dengan organisasi tersebut agar terciptanya tata kelola yang baik.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

No.	Penulis	Hipotesis	Metodologi Penelitian	Hasil & Rekomendasi
1.	Prima Yuda Pengaruh Pelaksanaan <i>Good Governance</i> Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi (Survey Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya)	<p>1. H₀: $\rho_{X_1X_2} = 0$ Pelaksanaan <i>Good Governance</i> tidak berkorelasi terhadap pengendalian Intern. H_a: $\rho_{X_1X_2} \neq 0$ Pelaksanaan <i>Good Governance</i> berkorelasi terhadap pengendalian Intern.</p> <p>2. H₀: $\rho_{YX_1} = 0$ Pelaksanaan <i>Good Governance</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi H₀: $\rho_{YX_1} \neq 0$ Pelaksanaan <i>Good Governance</i> secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja</p>	<p>Metode yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan survey. Populasi dari penelitian ini adalah para pegawai (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas Daerah masing-masing yang berjumlah (11) sebelas dinas. Pegawai (Pegawai Negeri Sipil) pada sebelas Dinas Daerah tersebut berjumlah 1.253 orang. Dan menggunakan metode <i>proportional random sampling</i> untuk menentukan sampel minimum yang jumlahnya 95 orang.</p> <p>Teknik analisis data. Dalam uji kualitas data menggunakan <i>Pearson's Product Moment</i>. Pengujian Hipotesis. Tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Uji seignifikasi secara simultan menggunakan uji F dan secara parsial menggunakan uji t.</p>	<p>Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa, pelaksanaan <i>good governance</i> dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi.</p>

		<p>Organisasi</p> <p>3. $H_0: \rho_{YX_2} = 0$</p> <p>Pengendalian Intern secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi</p> <p>$H_0: \rho_{YX_2} \neq 0$</p> <p>Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi</p> <p>4. $H_0: \rho_{YX_1} = \rho_{YX_2} = 0$</p> <p>Pelaksanaan <i>good governance</i> dan Pengendalian Intern secara simultan Tidak berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi.</p> <p>$H_0: \rho_{YX_1} = \rho_{YX_2} \neq 0$</p> <p>Pelaksanaan <i>good governance</i> dan</p>		
--	--	--	--	--

		Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi.		
2.	PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)	<p><i>H1: Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah.</i></p> <p><i>H2: Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.</i></p> <p><i>H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan</i></p>	<i>multiple regression</i>	<p>pertama, pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut sample dewan maupun masyarakat. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat.</p> <p>Kedua, interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut sampel dewan maupun sample masyarakat. Hubungan yang ditunjukkan adalah negatif artinya semakin tinggi akuntabilitas maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan semakin menurun.</p> <p>Ketiga, interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD menurut dewan, sedangkan menurut masyarakat tidak</p>

		<p><i>daerah.</i></p> <p><i>H4: Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.</i></p> <p><i>H5: Terdapat perbedaan yang signifikan antara fungsi pengawasan keuangan daerah menurut sampel masyarakat dan sampel dewan.</i></p>		<p>signifikan.</p> <p>Keempat, interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut dewan maupun masyarakat.</p> <p>Terakhir, terdapat perbedaan signifikan antara fungsi pengawasan APBD menurut dewan dan masyarakat.</p>
--	--	---	--	---

3.	<p>Bambang Sardjito Osmad Muthaher Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating</p>	<p>H1: Semakin tinggi tingkat partisipasi penyusunan anggaran semakin tinggi tingkat kinerja aparatur pemerintah daerah.</p> <p>H2: Semakin tinggi tingkat kesesuaian antar partisipasi anggaran dan budaya organisasi orientasi pad orang, semakin tinggi kinerja aparat pemerintah daerah. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesesuaian</p>	<p>Teknik Analisis Data. Untuk menguji hipotesis 1 digunakan regresi berganda (<i>Multiple Regression</i>). Dengan bentuk interaksi secara keseluruhan. Hipotesis 2 dan 3 diuji dengan regresi berganda dengan pendekatan uji interaksi .</p>	<p>Terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aprat pemerintah daerah.</p> <p>Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel budaya organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.</p> <p>Terdapat pengaruh signifikan antara variabel komitmen organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemrintah daerah.</p>
----	--	---	--	---

		<p>antara partisipasi anggaran dan budaya organisasi orientasi pada pekerjaan, semakin rendah kinerja aparat pemerintah daerah</p> <p>H3 : Komitmen Organisasi dalam memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Daerah</p>		
--	--	--	--	--

4.	Isma Coryanata Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd)	<p>H1: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah</p> <p>H2: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah</p> <p>H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan</p>	<p>Alat analisis untuk menguji hipotesis- hipotesis tersebut digunakan adalah analisis berganda (<i>multiple regression</i>)</p>	<p>Dari hasil pengujian regresi sederhana atas pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan publik pada anggota dewan DPRD di kota Bengkulu menunjukkan hubungan yang sangat signifikan.</p> <p>Partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik serta akuntabilitas, yang disebut dengan variable moderating, semuanya ikut mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan publik secara signifikan.</p>
----	---	--	--	--

		pengawasan keuangan daerah		
5.	Norma Ferdiana Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan Di Bei	<p>H1 : <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap <i>Leverage Ratio</i></p> <p>H2 : <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap <i>Liquidity Ratio</i></p> <p>H3 : <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap <i>Efficiency</i> atau <i>Turnover</i> atau <i>Asset Management Ratio</i></p> <p>H4 : <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap <i>Profitability Ratio</i></p>	<p>Proksi: <i>Good Corporate Governance</i> menggunakan index yang telah dibuat oleh IICG (<i>Indonesian Institute for Corporate Governance</i>).</p> <p>Analisis Data: Menggunakan Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji heteroskedastisitas.</p>	<p>Hasil: Dari hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pada pengujian pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio-rasio keuangan tidak semuanya memiliki pengaruh. Dari kelima rasio yang telah diukur terdapat satu rasio yang berpengaruh, empat rasio yang lainnya tidak berpengaruh. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> tidak hanya dari segi laporan keuangan saja tetapi ada faktor lain yang lebih bisa berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.</p>

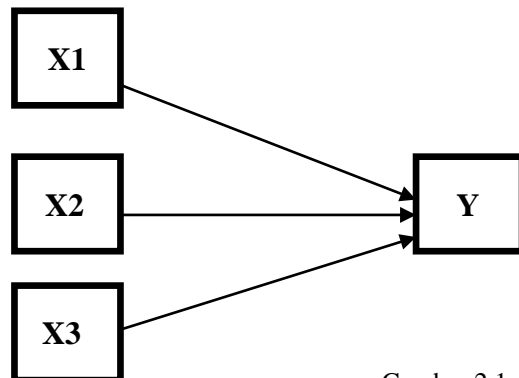
		H5 : <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap <i>Market-Value Ratio</i>		
6.	Rita Meutia Dan Nurfitriana Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> Terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Aceh	H1: Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja H3: Transparansi berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. H4: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap penyusunan anggaran	Populasi dalam penelitian ini adalah 39 SKPA yang terdiri dari 1 sekretariat daerah, 1 sekretariat DPRA, 17 dinas, 16 lembaga teknis daerah, dan 4 sekretariat lembaga keistimewaan Aceh. Pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda.	Hasil: 1. Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas secara simultan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. 2. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. 3. Transparansi secara parsial berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. 4. Partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja.

		berbasis kinerja H5: Efisiensi dan Efektivitas berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja.		
8.	Jajang Badruzaman & Irna Chairunnisa Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	Penelitian ini adalah analisis deskriptif	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan sensus. Metode Analisis yang digunakan adalah uji kualitas data, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi.	(1) Berdasarkan hasil analisis deskripsi, diketahui bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 14 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis termasuk dalam klasifikasi baik. Penilaian tersebut diukur menggunakan indikator perencanaan strategik, rencana kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja. (2) Berdasarkan hasil analisis deskripsi, diketahui bahwa penerapan <i>good governance</i> pada 14 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis termasuk dalam klasifikasi baik. Penilaian tersebut diukur menggunakan indikator partisipasi, taat hukum, transparansi, daya tanggap, kesetaraan,

				<p>efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik.</p> <p>(3) Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi, diketahui bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penerapan <i>good governance</i> memiliki hubungan kuat. Selain itu berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa 61 % dari penerapan <i>good governance</i> dipengaruhi oleh implementasi SAKIP, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.</p>
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Dengan melihat dasar teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini ingin menguji apakah penerapan prinsip-prinsip good governance berpengaruh terhadap kinerja organisasi nirlaba. Oleh karena itu dapat digambarkan bahwa kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

X1: Akuntabilitas

X3: Partisipasi

X2: Transparansi

Y: Kinerja Organisasi Nirlaba

2.3.1 Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi Nirlaba

Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja organisasi dikarenakan, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari *agent* kepada *principal*. Mardiasmo (2002: 20) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Kesuksesan kinerja organisasi ditentukan dari keselarasan antara *agent* dan *principal*, akuntabilitas yang baik dalam organisasi akan mengurangi konflik yang terjadi. Sehingga akuntabilitas berpengaruh terhadap kesuksesan dari organisasi tersebut. Kesuksesan dari organisasi dapat dilihat dari kinerja yang baik.

2.3.2 Transparansi dan Kinerja Organisasi Nirlaba

Transparansi merupakan prinsip dimana menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang organisasi tersebut. Transparansi berpengaruh terhadap kinerja organisasi nirlaba, dikarenakan sebuah transparansi merupakan suatu alat yang digunakan oleh *agent* untuk menunjukkan bahwa harapan atau tujuan yang diinginkan oleh *principal* telah dipublikasikan. Hal ini akan mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut.

2.3.3 Partisipasi dan Kinerja Organisasi Nirlaba

Partisipatif berarti bahwa setiap orang, siapa saja dapat turut serta dalam pengambilan keputusan. Partisipasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi nirlaba. Dalam organisasi nirlaba partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk membuat suatu keputusan. Untuk menjalankan suatu akuntabilitas, partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam penyusunan juga pengawasan terhadap organisasi. Hal ini dapat membuat tujuan antara *agent* dan *principal* berjalan lurus dan terhindar dari konflik. Achmadi (2002) dalam Cornyata (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam otonomi daerah karena dalam partisipasi terdapat aspek pengawasan dan aspirasi.

2.4 Hipotesis

Dari gambaran kerangka pemikiran diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi nirlaba.

H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi nirlaba.

H3: Efektifitas berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi nirlaba.

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek dari penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data, sesuai dengan pendapat Sugiono (2002:58) pengertian objek penelitian sebagai berikut: “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan guna tertentu tentang suatu hal objektif valid dan reliabel tentang suatu hal (varian tertentu)”.

Penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja organisasi nirlaba. Oleh karena itu yang akan menjadi objek penelitian penulis adalah organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba yang penulis akan teliti adalah organisasi nirlaba yang berada di daerah Jakarta.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance*. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif, dimana dalam metode tersebut dibagi dalam metode deskriptif dan kuantitatif.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematis aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Menurut Mudrajad Kuncoro (2001: 1) bahwa : “Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi, dimana pendekatan ini terdiri atas perumusan

masalah, menyusun model, mendapatkan data, mencari solusi, menguji solusi, menganalisa hasil dan mengimplementasikan hasil.”

Metode kuantitatif bertujuan untuk membuat suatu uraian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti kemudian menggabungkan antar variabel yang terlibat didalamnya.

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah variabel dari prinsip-prinsip *good governance* yaitu, akuntabilitas, transparansi serta partisipasi. Sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja organisasi nirlaba.

3.3.1 Akuntabilitas

Variabel pertama yang akan diukur adalah akuntabilitas. Meskipun semua prinsip sama pentingnya namun akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam prinsip *good governance*. Prinsip akuntabilitas menuntut 2 hal yaitu Prinsip ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Indikator dari prinsip akuntabilitas publik dibagi 2 tahapan yaitu¹:

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
 - a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan
 - b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders
 - c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku
 - d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi
 - e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
 - a. penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal
 - b. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan caracara mencapai sasaran suatu program

¹ Dikutip dari secretariat good public governance (2003)

- c. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat
- d. ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

3.3.2 Transparansi

Variabel independen kedua yaitu transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai (Krisna P 2003;15). Indikator dari transparansi publik ini adalah

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur biaya-biaya dan tanggung jawab,
- b. Kemudahan akses informasi,
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar,
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa.

3.3.3 Partisipasi

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi

sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Indikator dari partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik
- b. Menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan-masukan dari stakeholders
- c. Mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan masyarakat dan layanan publik.

3.3.4 Kinerja Organisasi Nirlaba

Kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. Kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar.

Untuk menilai kinerja organisasi diperlukan indikator-indikator pengukuran secara jelas. Banyak pendapat yang berbeda-beda dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Sebagai pedoman dalam menilai kinerja harus dikembalikan pada tujuan awal didirikannya organisasi.

Dalam organisasi sektor publik pengukuran kinerja tidaklah semudah di sektor swasta. Bila dilihat dari tujuan dibentuknya organisasi publik yaitu memenuhi kepentingan publik bukan untuk mencari keuntungan. Pengukuran kinerja sektor publik terlihat mudah, namun dalam kenyataannya banyak pendapat berbeda dalam pengukuran kinerja organisasi publik.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Efisiensi. Menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan factor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi.
2. Efektivitas. Apakah tujuan dari pendirian organisasi tersebut telah tercapai? Hal tersebut erat hubungannya dengan organisasi rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Ekonomi. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari dari objek penelitian sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan dari penelitian itu sendiri.

Sumber data primer didapat atau diperoleh langsung dari responden. Para pegawai dari organisasi nirlaba yang menjadi objek penelitian akan menjadi responden penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner angket ke tiap organisasi nirlaba yang menjadi objek penelitian ini.

3.5 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2011:119) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah objek yang berhubungan dengan pelaksanaan *good governance* dalam organisasi nirlaba yaitu organisasi yang berada di Jakarta. Sampel dalam penelitian ini pegawai yang berkerja di organisasi nirlaba tersebut.

Teknik penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria dari sampel yang akan diambil adalah sebagai berikut:

Kriteria Organisasi Nirlaba:

1. Telah Menerbitkan Laporan Keuangan
2. Laporan Keuangan Dapat diakses dengan mudah (Internet, Papan Pengumuman, dll)

Kriteria Responden:

1. Mempunyai pengalaman minimal 1 tahun di organisasi nirlaba.
2. Bagian yang mengurus keuangan.

3.6 Metode Analisis

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden yang menunjukkan tingkat pendidikan, lamanya bekerja dan usia

responden. Sedangkan untuk memberikan deskriptif tentang karakter variabel-variabel penelitian digunakan tabel distribusi yang menunjukkan *mean*, *median*, kisaran dan standar deviasi.

3.6.2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan software *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian (*variance*). Menurut Ghazali (2008) PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis covariance menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori, sedangkan PLS lebih bersifat *predictive model*.

PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* (Wold, 1985 dalam Ghazali, 2008) karena tidak didasarkan pada banyak asumsi, misalnya data harus terdistribusi normal dan sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan formatif. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh SEM yang berbasis kovarian karena akan menjadi *unidentified model*.

Menurut Ghazali (2008) tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. *Weight estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana *inner model* (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan *outer model* (model pengukuran

yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah *residual variance* darivariabel dependen (keduanya variabel laten dan indikator)diminimumkan.

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikatagorikan menjadi tiga. Pertama, adalah *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*loading*). Ketiga adalah berkaitan dengan *meandan* lokasi parameter (nilai konstan regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses iterasi tiga tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi.

Tahap pertama, menghasilkan *weight estimate*, tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi *means* dan lokasi (konstanta).

3.6.3. Model Spesifikasi

Model dalam penelitian ini adalah struktural.Indikator pada penelitian ini bersifat reflektif. Berikut adalah konstruk refleksif dan formatif dari penelitian ini:

Tabel 3.1

Konstruk	Sumber	Dimensi		Indikator
Akuntabilitas (refleksi f) (A)	B, Guy Peter, 'The Politics or Bureaucracy', (2000). London: Routledge hal. 299-381. Dikutip dari secretariat <i>good governance</i> .	a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan (A1)	X1	Setiap kebijakan yang organisasi ini buat telah tersedia bagi pendonor
			X2	Para pendonor pada umumnya tidak mengetahui tentang kebijakan yang diambil organisasi ini
			X3	para pendonor dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan organisasi ini.
			X4	pendonor sulit untuk mengakses informasi keuangan dari organisasi ini.
		b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders (A2)	X5	Setiap keputusan yang telah dibuat organisasi telah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku.
			X28	Setiap kebijakan yang dibuat organisasi ini tidak sesuai dengan tujuan pendornya
			X6	Setiap keputusan di organisasi ini telah sesuai dengan tujuan pendonor
(Martin Minogue, artikel "the management of public change; from 'old public administration' to 'new public management' dalam "law & governance" Issue I, British Council	c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku (A3)	X7	Setiap kebijakan yang telah dibuat organisasi ini telah sesuai dengan visi dan misi yang berlaku	

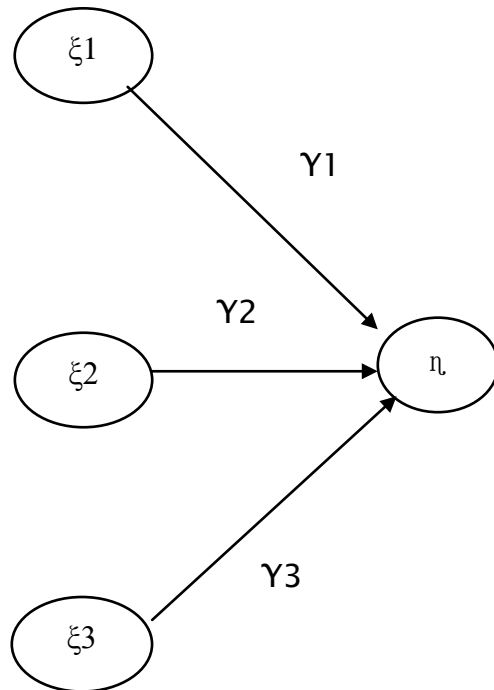
	Briefing.) Dikutip dari secretariat good governance.			
		d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi (A4)	X8	Organisasi ini mempunyai mekanisme pertanggungjawaban
(John W. Sutherland, "Management Handbook for Public Administrator, (1978), Van Nostrand Reinhold Company) Dikutip dari secretariat good governance.			X9	mekanisme kerja organisasi sudah sesuai dengan standar yang berlaku di organisasi ini
	e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. (A5)		X10	setiap pencapaian target dari organisasi merupakan skala prioritas dari organisasi ini
(Colm Allan, Coordinator Public Service Accountability Monitor Eastern Cape, South Africa, dalam paper berjudul " Civil Society and Public Accountability) Dikutip dari	f. penyebaran informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal (A6)		X11	Laporan keuangan organisasi ini dipublikasikan melalui media papan pengumuman
			X12	Laporan keuangan organisasi ini dipublikasikan melalui media internet, sehingga dapat diakses 24 jam

	secretariat good governance.	g. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program (A7)	X13	segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran dapat dilihat dilaporkan secara transparan		
	(Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia)	h. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat (A8)	X14	Organisasi ini telah mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengakses laporan keuangannya		
X15			setiap orang dapat mengakses laporan keuangan dari organisasi ini			
X16			akses untuk mengetahui laporan keuangan organisasi ini dibatasi			
Transparansi (refleksi f) (T)	Martin Minogue, Artikel "the new management of public change Dikutip dari secretariat good governance.	a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur biaya-biaya dan tanggung jawab (T1)	X17	Organisasi ini telah menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi		
			X18	Penerbitan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi		
	Transparency International Dikutip dari secretariat good governance.	b. Kemudahan akses informasi (T2)	X19	Akses untuk memperoleh dokumen laporan keuangan organisasi ini mudah diperoleh		
			Asian Development Bank, "Governance: Sound Development Management, 1999: hal 7-13) Dikutip dari	c. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa (T3)	X20	informasi mengenai laporan keuangan organisasi ini sulit untuk diakses
					X21	Laporan keuangan organisasi ini dapat dilihat di media massa
					X22	Laporan keuangan organisasi ini dapat di akses di media internet

	secretariat good governance.		X23	Informasi keuangan organisasi ini dapat diakses dengan mudah
Partisipasi (refleksi f) (P)	(Dr. Harmut Gustmann "public Participation in Public Service"	a. Mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik (P1)	X24	Publik dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan dari organisasi ini
			X25	Laporan keuangan organisasi ini tersedia bagi publik
			X26	organisasi ini tidak mengizinkan pihak luar untuk mengakses laporan keuangannya
		b. Kemampuan Masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan (P2)	X27	Masukan-masukan dari pendonor dilakukan dengan baik
			X29	Organisasi ini mengadakan pertemuan rutin dengan para pendonornya
Kinerja Organisasi Nirlaba (formatif) (KO)	Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik	a. Efisiensi. Menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan factor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi. (KO1)	X30	pengelolaan anggaran organisasi ini memanfaatkan dana sebaik mungkin dengan konsep value for money.
			X31	efisiensi dan penghematan selalu dilakukan untuk tujuan organisasi
			X32	pemanfaatan sumber daya finansial digunakan bukan untuk tujuan organisasi ini
			X33	pengelolaan anggaran dilakukan dengan efisien, pengeluaran terendah untuk mencapai tujuan.
		b. Efektivitas. Apakah tujuan dari pendirian organisasi tersebut telah tercapai? Hal	X34	pengelolaan dana dilakukan efektifitas, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil
			X35	sebagian besar pekerjaan tidak dilakukan dengan

		tersebut erat hubungannya dengan organisasi rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. (KO2)		prinsip efektifitas
			X36	sebagian besar pekerjaan dilakukan dengan prinsip efektifitas
		c. Ekonomi. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal. (KO3)	X37	pengelolaan anggaran organisasi dilakukan ekonomis, menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
			X38	Organisasi ini telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal.
			X39	Organisasi ini dalam menghimpun dana dan menggunakan dana selalu menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.
			X40	value for money merupakan jembatan untuk mengantarkan organisasi menuju good governance

Model analisis jalur secara persamaan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1

Berdasarkan model persamaan berikut maka dapat dirumuskan model persamaan sebagai berikut:

$$\eta = \gamma_1\xi_1 + \gamma_2\xi_2 + \gamma_3\xi_3 + \zeta_1$$

3.6.4 Outer Model

Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala

pengukuran nilai *loading* 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2006). *Discriminant validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya.

Sedangkan untuk menilai *reliabilitas model*, dipergunakan *composite reliability* dari suatu konstruk. *Composite reliability* yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *internal consistency* dan *cronbach alpha* (Ghozali, 2011). Dibandingkan dengan *cronbach alpha*, ukuran *composite reliability* tidak mengasumsikan *tau equivalence* antar pengukuran dengan asumsi semua indikator memiliki bobot sama. Sehingga *cronbach alpha* cenderung *lower bound estimate reliability*, sedangkan *composite reliability* merupakan *closer approximation* dengan asumsi estimasi parameter lebih akurat (Ghozali, 2011).

3.6.5 Inner Model

Inner model menggambarkan hubungan antara variabel laten yang ada pada model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2011). Di samping melihat nilai *R-square*, model PLS juga dievaluasi dengan melihat *Q-square* prediktif relevansi untuk model konstruktif. *Q-square* mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *resampling* dan *bootstrapping*. Pengaruh antar variabel dianggap signifikan pada tingkat 5% jika nilai *T-statistic* lebih besar dari T tabel 1,96 (Ghozali, 2011)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Unit Analisis

Objek dalam penelitian ini adalah organisasi nirlaba yang berada di Jakarta. Dari sejumlah organisasi nirlaba tersebut, hanya ada 18 organisasi yang bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini. Jumlah kuesioner yang dibagikan untuk setiap organisasi nirlaba 2-3, disesuaikan karena untuk yang menjadi responden penelitian ini adalah orang yang bekerja dibagian keuangan dari organisasi tersebut.

Kuesioner yang disebar dalam penelitian adalah 40 buah dengan asumsi bahwa setiap organisasi dapat diisi oleh 2 responden. Dari 30 organisasi nirlaba yang sedianya akan menjadi objek, hanya terdapat 20 organisasi nirlaba saja yang bersedia untuk mengisi kuesioner.

Tabel 4.1

Daftar Kuesioner

Kuesioner	Jumlah
Kuesioner yang didistribusikan	40
Kuesioner yang tidak kembali	0
Kuesioner yang tidak diisi lengkap	0
Kuesioner yang layak digunakan untuk keperluan input data	40

Sumber: Data diolah, 2013

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pegawai yang bekerja dibagian keuangan pada organisasi nirlaba. dengan syarat minimal berkerja adalah 1 tahun.

Seluruh pegawai yang bekerja di bagian keuangan pada organisasi ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi responden dengan membagi dalam beberapa kategori yaitu jenis kelamin dan lama bekerja.

1. Jenis Kelamin

Hasil pengolahan data pada tabel berikut berisi tentang jenis kelamin responden

Tabel 4.2

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	16	40%
2	Perempuan	24	60%
Total		40	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2013

Hasil pengolahan data pada tabel 4.2 yang berisi tentang jenis kelamin responden, diketahui responden yang paling banyak berjenis kelamin pria 16 orang (40%), dan responden berjenis kelamin wanita 24 orang (60%).

2. Lama Bekerja

Tabel 4.3

No	Masa kerja	Frekuensi	Persentase
1	1 - 3 tahun	36	90%
2	4 - 7 tahun	0	0
3	8 – 10 tahun	3	7.5%
4	> 10 tahun	1	2.5%
	Total	40	100

Pada tabel 4.3 yang berisi informasi tentang lamanya pengalaman kerja, diketahui bahwa responden yang memiliki lama pengalaman kerja 1-3 tahun sebanyak 36 orang (90%), lama pengalaman kerja 8-10 tahun sebanyak 3 orang (7.5%), dan lama pengalaman kerja > 10 tahun sebanyak 1 orang (2.5%). Kesimpulannya adalah responden penelitian sebagian besar telah lama bekerja selama 1-3 tahun pada organisasi nirlaba.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan pengolahan data Partial Least Square atau disingkat dengan PLS. Pengujian dengan pendekatan PLS ini bersifat praktis karena pengujian ini tidak dibatasi oleh harus terpenuhinya data yang berdistribusi normal dan batasan jumlah sampel data. Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis Partial Least Square (PLS) memerlukan 2 tahap untuk menilai Fit Model dari sebuah model penelitian (Ghozali, 2006). Analisis data dengan

pendekatan PLS dilakukan dengan mengevaluasi Model pengukuran (*measurement model*) dan Model Struktural (*structural model*).

Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

4.2.1 Menilai *Outer Model* atau *Measurement Model*

Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data dengan SmartPLS untuk menilai outer model yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity dan Composite Reliability. Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score yang diestimasi dengan Software PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Chin, 1998 (dalam Ghozali, 2006) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan batas loading factor sebesar 0,50.

Tabel 4.4

Outer Loading (Measurement Model)

	Model Awal	Modifikasi
	Akuntabilitas	
X1	0.901	0.901
X2	0.902	0.902
X3	0.761	0.761
X4	0.761	0.761
X5	0.86	0.86
X28	-0.468	

X6	0.907	0.907
X7	1	1
X8	-0.651	
X9	0.945	0.945
X10	1	1
X11	0.783	0.783
X12	0.812	0.812
X13	1	1
X14	0.887	0.887
X15	0.971	0.971
X16	0.971	0.971

Transparansi		
	Model Awal	Modifikasi
X17	0.187	
X18	0.998	0.998
X19	1	1
X20	0.974	0.974
X21	0.009	
X22	0.974	0.974
X23	0.35	
Partisipasi		
	Model Awal	Modifikasi
X24	0.939	0.939
X25	0.743	0.743
X26	0.939	0.939
X27	0.852	0.852
X29	0.796	0.796
Kinerja Organisasi		
	Model Awal	Modifikasi
X30	0.777	0.777
X31	0.655	0.655
X32	0.94	0.94

X33	0.94	0.94
X34	0.783	0.783
X35	0.858	0.858
X36	0.858	0.858
X37	0.792	0.792
X38	0.882	0.882
X39	0.771	0.771
X40	0.674	0.674

Hasil pengolahan dengan menggunakan SmartPLS dapat dilihat pada tabel 4.4. Nilai outer model atau korelasi antar konstruk dengan variabel pada awalnya belum memenuhi *convergent validity* karena masih cukup banyak indikator yang memenuhi nilai *loading factor* dibawah 0,50.

Modifikasi pada model dilakukan dengan mengeluarkan indikator-indikator yang memiliki nilai loading factor dibawah 0,50. Pada model modifikasi sebagaimana pada tabel 4.4 tersebut menunjukkan bahwa semua loading factor memiliki nilai diatas 0,50, sehingga konstruk untuk semua variabel sudah tidak ada yang perlu dieliminasi dari model. Gambar konstruk dapat dilihat dilampiran.

4.2.1.2 Statistik Deskriptif

Beberapa indikator dari variabel penelitian tidak digunakan dalam pengujian hipotesis, sehingga dalam penyajian analisis statistik deskriptif juga tidak akan disertakan. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data berdasarkan atas hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap masing-masing indikator pengukur variabel. Analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif

	<i>Akuntabilitas</i>	<i>Transparansi</i>	<i>Partisipasi</i>	<i>Kinerja NGO</i>
Mean	60.125	24.825	17.825	43.025
Median	58.5	26	19	43
Standard Deviation	9.427693793	4.005685063	3.1694657	7.563364805
Minimum	39	14	11	24
Maximum	78	32	23	52
Count	40	40	40	40

Sumber: Data diolah 2013

Berdasarkan data tersebut dapat ditunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas mempunyai kisaran teoritis antara 39 sampai dengan 78 dengan nilai rata-rata sebesar 60.125 yang lebih tinggi diatas median (58.5), dapat dikatakan bahwa organisasi nirlaba secara umum mempunyai akuntabilitas yang tinggi. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 9.428 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang akuntabilitas yang besarnya 58.5.

Variabel Transparansi mempunyai kisaran teoritis antara 14 sampai dengan 32 dengan nilai rata-rata sebesar 24.825 yang lebih tinggi diatas median (26), dapat dikatakan bahwa organisasi nirlaba secara umum mempunyai transparansi yang tinggi. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 4.005 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang transparansi yang besarnya 26.

Variabel Partisipasi mempunyai kisaran teoritis antara 11 sampai dengan 23 dengan nilai rata-rata sebesar 17.825 yang lebih rendah dibanding median (19), dapat dikatakan bahwa organisasi nirlaba secara umum mempunyai partisipasi yang rendah. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 3.167 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang partisipasi yang besarnya 19.

Variabel Akuntabilitas mempunyai kisaran teoritis antara 24 sampai dengan 52 dengan nilai rata-rata sebesar 43.025 yang lebih tinggi diatas median (43). Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 7.56 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang kinerja organisasi nirlaba yang besarnya 43.

4.2.1.2 *Discriminant Validity*

Discriminant Validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model mempunyai discriminant validity yang baik jika setiap nilai loading dari setiap indikator dari sebuah variabel laten memiliki nilai loading yang paling besar dengan nilai loading terhadap variabel laten lainnya. Hasil pengujian discriminant validity diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.6
 Nilai *Discriminant Validity*
 (*cross loading*)

	Akuntabilitas	Kinerja NGO	Partisipasi	Transparansi
X1	0.89188	0.651405	0.460093	0.666436
X2	0.89188	0.651405	0.460093	0.666436
X3	0.596618	0.531007	0.481048	0.449948
X4	0.596618	0.531007	0.481048	0.449948
X5	0.788254	0.483011	0.414239	0.553935
X6	0.879385	0.652215	0.518103	0.517155
X7	0.874283	0.643405	0.518719	0.491808
X9	0.721571	0.797374	0.425821	0.377875
X10	0.816818	0.543621	0.530801	0.453864
X11	0.208171	0.282463	0.17843	0.291694
X12	0.224231	0.197128	0.343749	0.633257
X13	0.858256	0.677709	0.492164	0.392574
X14	0.842186	0.619398	0.610775	0.640008
X15	0.813851	0.471249	0.683682	0.77414
X16	0.813851	0.471249	0.683682	0.77414
X18	0.654088	0.425383	0.635179	0.867138
X19	0.521273	0.533243	0.518372	0.701276
X20	0.593331	0.213462	0.424956	0.901575
X22	0.593331	0.213462	0.424956	0.901575
X24	0.349563	0.163563	0.782155	0.339086
X25	0.684152	0.348024	0.762949	0.800062
X26	0.325809	0.144026	0.803744	0.325925
X27	0.383424	0.407879	0.564164	0.249663
X29	0.463859	0.551034	0.488011	0.291236
X30	0.530972	0.829912	0.36611	0.283808
X31	0.486233	0.529513	0.545613	0.25657
X32	0.581415	0.767625	0.524138	0.453393
X33	0.581415	0.767625	0.524138	0.453393
X34	0.65537	0.857319	0.302407	0.371216
X35	0.255436	0.518976	-0.015903	0.075987
X36	0.255436	0.518976	-0.015903	0.075987
X37	0.512318	0.797987	0.325609	0.102421
X38	0.611314	0.849629	0.184819	0.285336

X39	0.572491	0.734897	0.471352	0.288806
X4	0.596618	0.531007	0.481048	0.449948
X40	0.717322	0.548847	0.36584	0.545669

Sumber: SmartPLS 2.0

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai *loading factor* tertinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan *loading factor* kepada konstruk lain. Tabel di atas menunjukkan bahwa *loading factor* untuk indikator Akuntabilitas (X1 sampai dengan X16) mempunyai *loading factor* kepada konstruk BO lebih tinggi dari pada dengan konstruk yang lain. Sebagai ilustrasi *loading factor* X1 kepada Akuntabilitas adalah sebesar 0.89188 yang lebih tinggi dari pada *loading factor* kepada Transparansi (0.666436), Partisipasi (0.460093) dan Kinerja NGO (0.651405). Hal serupa juga tampak pada indikator-indikator yang lain. Hal ini berarti bahwa setiap variabel laten belum memiliki *discriminant validity* yang baik dimana beberapa variabel laten masih memiliki pengukur yang berkorelasi tinggi dengan konstruk lainnya.

Discriminant validity dapat juga dinilai dengan membandingkan nilai *square root of Average Variance Extracted* (AVE) setiap konstruk dengan melihat korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah nilai AVE harus lebih besar dari 0.50. Kemudian syarat berikutnya yang harus dipenuhi adalah nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka

dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik (Fornell dan Larcker, 1981 dalam Ghozali 2011).

Tabel 4.7 *Latent Variable Correlations*

	Akuntabilitas	Kinerja NGO	Partisipasi	Transparansi
Akuntabilitas	1.000			
Kinerja NGO	0.742981	1.000		
Partisipasi	0.647504	0.462749	1.000	
Transparansi	0.701592	0.417496	0.600635	1.000

Sumber: SmartPLS 2.0

Tabel 4.8 AVE dan Akar AVE

	AVE	$\sqrt{\text{AVE}}$
Akuntabilitas	0.567593	0.753387
Kinerja NGO	0.511024	0.714859
Partisipasi	0.47926	0.761091
Transparansi	0.717348	0.846963

Sumber: SmartPLS 2.0

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa korelasi maksimal konstruk Kinerja NGO adalah 0.742981 sedangkan nilai akar AVE-nya adalah 0.714859. Korelasi maksimal Partisipasi adalah 0.47926 sedangkan nilai akar AVE-nya 0.761091. Kemudian Korelasi dari konstruk Transparansi adalah 0.600635 sedangkan nilai akar AVE-nya adalah 0.846963.

4.2.1.3 Mengevaluasi Reliability dan Average Extracted (AVE)

Kriteria *validity* dan reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai reliabilitas suatu konstruk dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dari masing-masing konstruk. Konstruk dikatakan memiliki nilai reliabilitas yang tinggi jika nilainya 0,70 dan AVE berada diatas 0,50. Pada tabel 4.6 akan disajikan nilai *Composite reliability* dan AVE untuk seluruh variabel.

Tabel 4.9
Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)

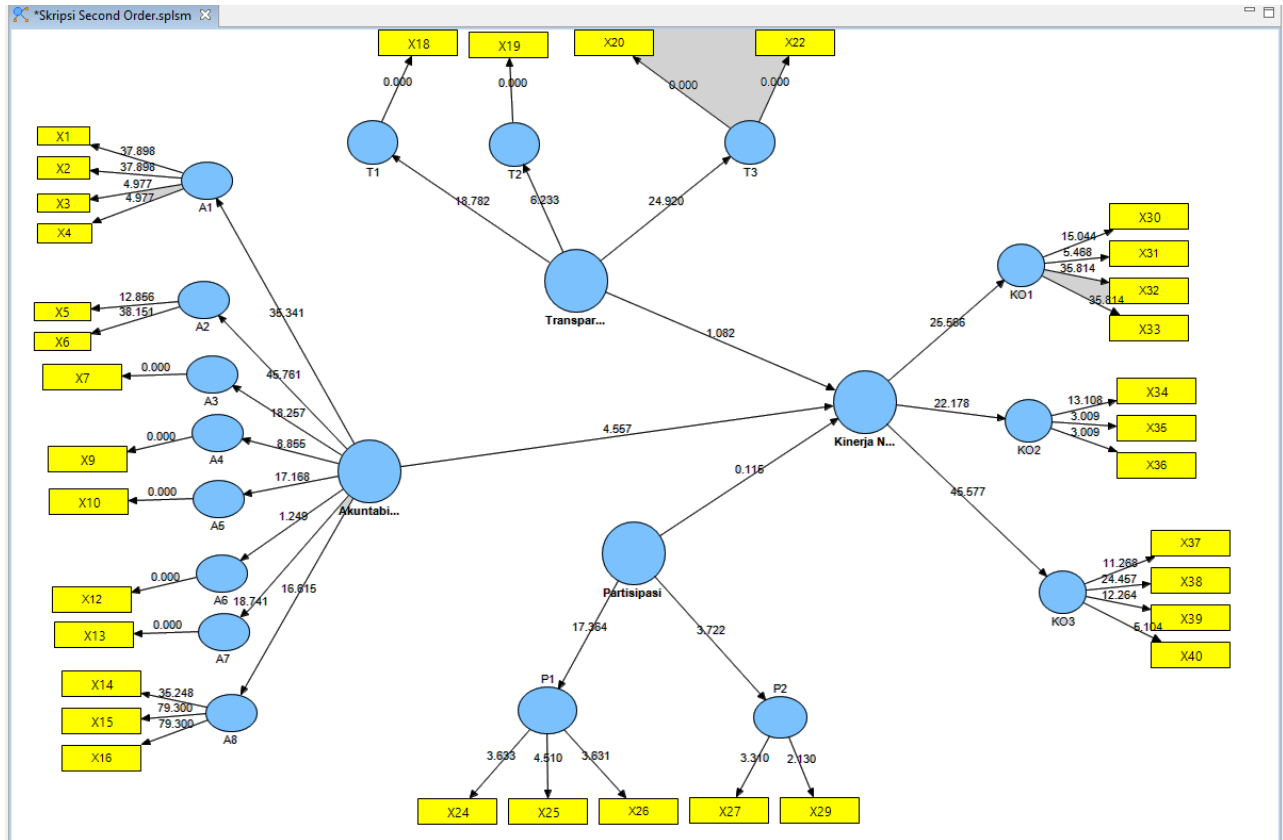
	AVE	Composite Reliability
Akuntabilitas	0.567593	0.947486
Kinerja	0.511024	0.917247
NGO		
Partisipasi	0.47926	0.816261
Transparansi	0.717348	0.909537

Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *composite reliability* diatas 0.70 dan AVE diatas 0.50 sebagaimana kriteria yang direkomendasikan.

4.2.2 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian *Inner Model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model Struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Gambar 4.1
Model Struktural



Dalam menilai model atau menguji goodness-fit dari penelitian ini dalam PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Tabel 4.10 merupakan hasil estimasi *R-square* dengan menggunakan SmartPLS.

Tabel 4.10
Nilai *R-square*

	R Square
A1	0.837586
A2	0.873009
A3	0.76437
A4	0.520665

A5	0.667191
A6	0.05028
A7	0.736603
A8	0.763306
Akuntabilitas	
P1	0.800551
P2	0.409771
Partisipasi	
T1	0.751928
T2	0.491788
T3	0.812838
Transparansi	
KO1	0.781262
KO2	0.66536
KO3	0.900974
Kinerja NGO	0.577383

Model Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi dan Transparansi terhadap Kinerja Organisasi Nirlaba memberikan nilai R-Square sebesar 0.58 yang dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk Kinerja NGO yang dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi sebesar 58% sedangkan 42% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti.

Prediction relevance (Q Square) atau dikenal dengan Stone-Geissers. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi dengan prosedur blindfolding. Apabila nilai yang didapatkan 0,02 (kecil), 0,15 (sedang) dan 0,35 (besar). Untuk melihat nilai Q-square dapat dilihat dari tabel *redudancy* sebagai berikut.

Tabel 4.11
Q-Square

redundancy	
Akuntabilitas	0.561
Kinerja NGO	0.273
Partisipasi	0.461
Transparansi	0.746

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai dari masing-masing indikator lebih besar dari 0. Kinerja NGO mempunyai nilai sebesar 0,273 hal ini menunjukkan bahwa konstruk atau model tersebut mempunyai nilai *Predictive Relevance* sedang (diatas 0,15). Gambar *blindfolding* dapat dilihat di lampiran 13.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output Total Effects (Mean, STDEV, T-Values). Tabel berikut akan memberikan output estimasi untuk pengujian model struktural.

Tabel 4.11

Total Effects (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
Akuntabilitas -> Kinerja NGO	0.886354	0.861897	0.194516	0.194516	4.556714
Partisipasi -> Kinerja NGO	0.022648	0.027584	0.197777	0.197777	0.114514
Transparansi -> Kinerja NGO	-0.224188	-0.198975	0.207161	0.207161	1.082192

Sumber: SmartPLS 2.0

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan stimulasi. Dalam hal ini dilakukan metode *bootstrap* terhadap sampel. Pengujian dengan *bootstrap* juga dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian. Hasil pengujian dengan Bootstrapping dari analisis PLS sebagai berikut:

4.2.3.1 Pengujian Hipotesis 1 (Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi nirlaba)

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variabel akuntabilitas dengan kinerja organisasi nirlaba (NGO) menunjukkan nilai koefisien jalur 0.886354 dengan nilai t sebesar 4.556714. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel (1,96). Hal ini berarti Akuntabilitas mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap komitmen profesi yang berarti sesuai dengan hipotesis pertama dimana akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja NGO. hal ini menandakan **hipotesis 1 diterima.**

4.2.3.2 Pengujian Hipotesis 2 (Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi nirlaba)

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variabel akuntabilitas dengan kinerja organisasi nirlaba (NGO) menunjukkan nilai koefisien jalur -0.224188 dengan nilai t sebesar 1.082192. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai t tabel (1,96). Hal ini berarti Transparansi mempunyai hubungan Negatif dan tidak signifikan terhadap komitmen profesi yang berarti tidak sesuai dengan hipotesis

pertama dimana akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja NGO. hal ini menandakan **hipotesis 2 ditolak.**

4.2.3.3 Pengujian Hipotesis 3 (Partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi nirlaba)

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variabel akuntabilitas dengan kinerja organisasi nirlaba (NGO) menunjukkan nilai koefisien jalur 0.022648 dengan nilai t sebesar 0.114514. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai t tabel (1,96). Hal ini berarti Partisipasi mempunyai hubungan Negatif dan tidak signifikan terhadap komitmen profesi yang berarti tidak sesuai dengan hipotesis pertama dimana akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja NGO. hal ini menandakan **hipotesis 3 ditolak.**

4.3 Pembahasan

Dalam penelitian ini, hasil analisis data peneliti melibatkan 40 responden. penelitian ini mencakup empat variabel yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik terhadap kinerja organisasi nirlaba.

4.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja NGO

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dapat disimpulkan bahwa konstruk akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap konstruk Kinerja Organisasi Nirlaba secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistic yang lebih besar dari 1,96 yakni sebesar 4.556714. Dengan demikian H1 dalam penelitian ini diterima. Hal

ini menunjukkan bahwa organisasi nirlaba yang akuntabilitasnya baik akan berdampak pada tingginya kinerja organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, suatu organisasi nirlaba yang mempunyai suatu mekanisme pertanggungjawaban yang baik kepada para pendornya dengan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya terhadap si pendonor, akan meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi tersebut. Sehingga aliran dana terhadap organisasi tersebut tidaklah putus ditengah jalan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rita Mutia dan Nurfitriana yang menyebutkan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja penyusunan anggaran pemerintah.

Masalah akuntabilitas merupakan hal penting dalam suatu organisasi nirlaba. akuntabilitas sudah menjadi tuntutan terhadap LSM-LSM. Seperti kasus berikut ini: Keberadaan LSM plat merah ini salah satunya muncul dalam perkara korupsi Bupati Kepulauan Riau Huzrin Hood. Dalam persidangan terungkap, ada 25 LSM yang menerima bantuan senilai Rp 2,1 miliar yang diambil dari APBD Kepulauan Riau 2001-2002. Namun, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Riau Norbet Johan mengaku, 25 LSM itu tidak terdaftar di pemerintahan kabupaten setempat (Kompas, 12 Juli 2003).

4.3.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja NGO

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variabel transparansi dengan kinerja organisasi nirlaba (NGO) menunjukkan nilai koefisien jalur -0.224188 dengan nilai t sebesar 1.082192 . Nilai tersebut lebih kecil dari nilai t tabel ($1,96$). Hal ini berarti Transparansi mempunyai hubungan Negatif dan tidak signifikan terhadap komitmen profesi yang berarti tidak sesuai dengan hipotesis pertama dimana akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja NGO. hal ini menandakan **hipotesis 2 ditolak**. Hal ini berarti sebuah organisasi nirlaba yang tidak mempunyai transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan organisasi nirlaba tersebut.

Organisasi nirlaba yang tidak transparan atas laporan keuangannya membuat para pendonor kehilangan kepercayaan terhadap organisasi tersebut dan akan mengurangi dukungan terhadap organisasi tersebut. sehingga secara finansial, pemasukan untuk organisasi tersebut berkurang sehingga menyebabkan kinerja organisasi tersebut buruk. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Sopanah Menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik. perbedaan hasil penelitian ini karena objek penelitian yang diambil peneliti berbeda. pada penelitian terdahulu unit analisisnya adalah pemerintahan. Sedangkan unit analisis peneliti adalah organisasi nirlaba. Sample yang diambil pun berbeda dan juga metode penelitian yang berbeda menyebabkan hasil penelitian ini berbeda.

4.3.3 Pengaruh Partisipasi Terhadap Kinerja NGO

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dapat disimpulkan bahwa konstruk Partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap konstruk Kinerja Organisasi Nirlaba secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistic yang lebih kecil dari 1,96 yakni sebesar 0.114514. Dengan demikian H3 dalam penelitian ini ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Organisasi nirlaba yang menunjukkan tindakan partisipatif terhadap masyarakat tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi tersebut.

Data statistik tersebut menunjukkan bahwa kinerja organisasi nirlaba tidak dipengaruhi oleh partisipasi publik. Karena yang menjadi *stakeholder* dari organisasi nirlaba adalah para pendornya sehingga keikutsertaan publik dalam mencapai tujuan organisasi tidak terlalu berpengaruh. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang dibentuk karena kesamaan tujuan antara si pendonor dengan pihak manajemen sendiri. Pihak pendonor mempercayakan kepada pihak manajemen untuk mengelola sumber daya finansialnya. Hal ini membuat hubungan antara manajemen dengan pendonor tidak dipengaruhi oleh hal lain diluar itu. Oleh karena itu partisipasi publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi nirlaba.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu Rita Mutia dan Nurfitriana yang menyebutkan bahwa partisipasi publik secara parsial berpengaruh terhadap kinerja penyusunan anggaran pemerintah. Hasil penelitian ini berbeda dikarenakan objek penelitian yang diambilpun berbeda. Pada penelitian sebelumnya yang menjadi sampel adalah pegawai yang bekerja

dipemerintahan namun penelitian ini di Organisasi Nirlaba. Metode penelitian juga berbeda pada penelitian ini memakai metode analisis SEM berbasis *Partial Least Square*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba yang mempunyai akuntabilitas yang baik maka kinerja dari organisasi nirlaba tersebut juga baik.
2. Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba yang tidak mempunyai transparansi yang baik tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan dari organisasi nirlaba tersebut.
3. Partisipasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba yang mempunyai transparansi yang baik tidak menjamin kinerja dari organisasi nirlaba tersebut juga baik. Organisasi nirlaba yang menunjukkan tindakan partisipatif terhadap masyarakat tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 prinsip utama dari prinsip-prinsip *good governance*.
2. Sampel yang diambil peneliti hanya 40
3. Metode analisis yang digunakan peneliti hanya menggunakan metode analisis SEM berbasis *Partial Least Square*

5.3 Saran

1. Kinerja suatu organisasi nirlaba diharapkan dapat ditingkatkan dengan membuat suatu sistem pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari manajemen kepada manajemennya. Dengan adanya akuntabilitas yang baik dari organisasi nirlaba diharapkan dapat meningkatkan sumber daya financial dari organisasi nirlaba tersebut.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel dari prinsip good governance yang lainnya.\
3. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambahkan jumlah sampel yang ingin diteliti agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih
4. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan metode analisis lain karena perbedaan dalam metode analisis dapat merubah hasil penelitian

Daftar Pustaka

- Badruzaman, Jajang dan Irna Chairunisa. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance. Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi.
- David, Thomas, W.D., *Development* NGOs dan Akuntabilitas Kebawah: Mencapai Efektivitas yang Melampaui 'Praktik Terbaik'.
- Endarti Esa, Wahyu, (2005), *Aplikasi Prinsip Good Governance* Dalam Sektor Publik. Taman Internasional B1 Citra Raya, Surabaya.
- Ghozali, Imam, 2011. *Model Partial Least Square*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Negeri Diponegoro
- Hazmi Yusri, Faisal dan Zuarni. (2011) *Akuntabilitas Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Daerah*. Aceh: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan.
- Hoesada, Jan. *Akuntansi Organisasi Nirlaba*.
- Ibrahim, Rustam., (2012) *Akuntabilitas LSM*, Jakarta: Konsil LSM Indonesia.
- Jani Lucky, (2004) *Good NGO Governance*,. Jakarta.
- Krina, Lalolo Loina P., (2003) *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi Sekretariat Good Public Governance*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kusumawati, Dwi dan Bambang Riyanto LS, (2005) *Corporate Governance Dan Kinerja: Analisis Pengaruh Compliance Reporting Dan Struktur Dewan Terhadap Kinerja*.

Lestari Dyah, Ekowati., (2011), *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Mardiasmo (2003). *Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Universitas Gadjah Mada.

Mardiasmo, (2002), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Offset.

Meutia, Rita dan Nurfitriana., (2011), *Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Aceh*.
Jurnal Akuntansi Dan Keuangan,

Mulyawan, Budi. (2009), *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi*. USU, Medan.

Pamungkas, Bambang (2005). *Pengaruh Penerapan AKuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Jurnal Ilmiah Ranggagadang*.

Rahmawati, Adis Dwi, Sri Suwiri dan Maesaroh. *Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Metode Balanced Scorecard*.

Renyowijoyo, Muindro., (2010), *Akuntansi Sektor Publik (Organisasi Nirlaba)*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Santoso, Urip dan Yohanes Joni Panbelum. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud.

Sugiyono, (2011), Metode Penelitian Kombinasi, Yogyakarta: Alfabeta Bandung.

Sulistiyawan, Dedi., (2007) Akuntansi Nirlaba Menggunakan 'Accurate', Jakarta: Elex Media Koputindo.

Wahyudi, Isa dan Sopanah, (2011). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

Yuda, Prima., (2012), Pengaruh *good governance* dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.

LAMPIRAN 1

Kuesioner

No.	Kuesioner	STS	TS	N	S	SS
1	Setiap kebijakan yang organisasi ini buat telah tersedia bagi pendonor					
2	Akses untuk memperoleh dokumen laporan keuangan organisasi ini mudah diperoleh					
3	akses untuk mengetahui laporan keuangan organisasi ini dibatasi					
4	efisiensi dan penghematan selalu dilakukan untuk tujuan organisasi					
5	Informasi keuangan organisasi ini dapat diakses dengan mudah					
6	informasi mengenai laporan keuangan organisasi ini sulit untuk diakses					
7	Laporan keuangan organisasi ini dapat di akses di media internet					
8	Laporan keuangan organisasi ini dapat dilihat di media massa					
9	Laporan keuangan organisasi ini dipublikasikan melalui media internet, sehingga dapat diakses 24 jam					
10	Laporan keuangan organisasi ini dipublikasikan melalui media papan pengumuman					
11	Laporan keuangan organisasi ini tersedia bagi publik					
12	Pendapat-pendapat dari pendonor dilakukan dengan baik					
13	mekanisme kerja organisasi sudah sesuai dengan standar yang berlaku di organisasi ini					
14	Organisasi ini dalam menghimpun dana dan menggunakan dana selalu menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.					
15	Organisasi ini mempunyai mekanisme pertanggungjawaban					
16	Organisasi ini mengadakan pertemuan rutin dengan para pendonornya					

17	Organisasi ini telah mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengakses laporan keuangannya					
18	Organisasi ini telah menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi					
19	Organisasi ini telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal.					
20	organisasi ini tidak mengizinkan pihak luar untuk mengakses laporan keuangannya					
21	para pendonor dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan organisasi ini.					
22	Para pendonor pada umumnya tidak mengetahui tentang kebijakan yang diambil organisasi ini					
23	pemanfaatan sumber daya finansial digunakan bukan untuk tujuan organisasi ini					
24	pendonor sulit untuk mengakses informasi keuangan dari organisasi ini.					
25	Penerbitan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi					
26	pengelolaan anggaran dilakukan dengan efisien, pengeluaran terendah untuk mencapai tujuan.					
27	pengelolaan anggaran organisasi dilakukan ekonomis, menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.					
28	pengelolaan anggaran organisasi ini memanfaatkan dana sebaik mungkin dengan konsep value for money.					
29	pengelolaan dana dilakukan efektifitas, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil					
30	Publik dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan dari organisasi ini					
31	sebagian besar pekerjaan dilakukan dengan prinsip efektifitas					
32	sebagian besar pekerjaan tidak dilakukan dengan prinsip efektifitas					

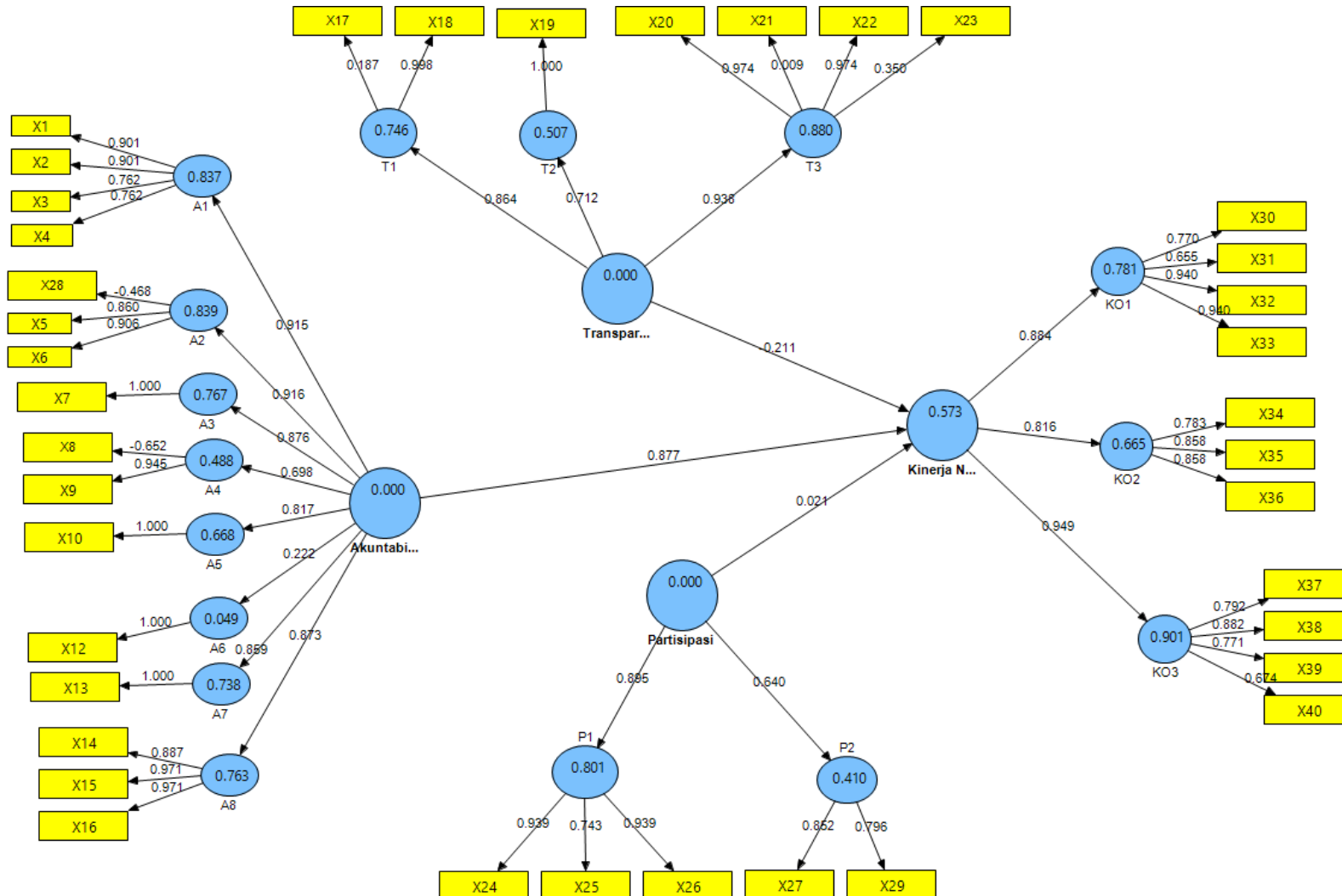
33	segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran dapat dilihat dilaporkan secara transparan					
34	Setiap kebijakan yang dibuat organisasi ini tidak sesuai dengan tujuan pendonornya					
35	Setiap kebijakan yang telah dibuat organisasi ini telah sesuai dengan visi dan misi yang berlaku					
36	Setiap keputusan di organisasi ini telah sesuai dengan tujuan pendonor					
37	Setiap keputusan yang telah dibuat organisasi telah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku.					
38	setiap orang dapat mengakses laporan keuangan dari organisasi ini					
39	setiap pencapaian target dari organisasi merupakan skala prioritas dari organisasi ini					
40	value for money merupakan jembatan untuk mengantar organisasi menuju good governance					

LAMPIRAN 2

No.	Nama Organisasi	Alamat
1	Greenpeace	Jl. KH. Abdullah Syafi'ie No. 47, Tebet Timur, Jaksel
2	WALHI	Jl. Tegal Parang utara 14, Mampang
3	PPSW	Jl. Duren Sawit Asri (dh. Jl. Lapangan I) Swadaya Raya, Duren Sawit
4	Rumah Relawan	Jl. Percetakan Negara, Jakarta Pusat
5	Graha yatim & dhuafa	Jl. Cempaka Putih Raya no. 1, Cempaka putih timur
6	IPNU	Gdg PP IPNU Lt. 3 Jl. Kramat Raya 164, Jakpus
7	YAPPIKA	Jl. Pedati Raya no. 20, Jakarta Timur
8	Yayasan Bina Usaha lingkungan	Jl. Bacang 2 No. 8 Gandaria, Jaksel
9	AIDSINA Foundation	Jl. Kramat Sentiong no 49
10	YLKI	Jl. Pancoran Barat 7/1 Duren Tiga, Jaksel
11	Women Crisis Centre	Jl. Tebet Barat Dalam 4B/23, Jaksel
12	Yayasan KEHATI	Jl. Bangka 8 no. 3B, Pela Mampang
13	Dana Mitra Lingkungan	ITC Fatmawati blok B1/12
14	Caritas	Jl. Matraman No. 31 Kebon Manggis, Matraman
15	Pusat Muhammadiyah	Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta
16	Lembaga PSIK	Jl. Letjen Suprpto Rukan Graha Cemapak Mas
17	Kemitraan (partnership)	Jl. Wolter Mongonsidi no. 3 Kebayoran Baru
18	Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia	Jl. Percetakan Negara IX No. 10A, Jakarta Pusat

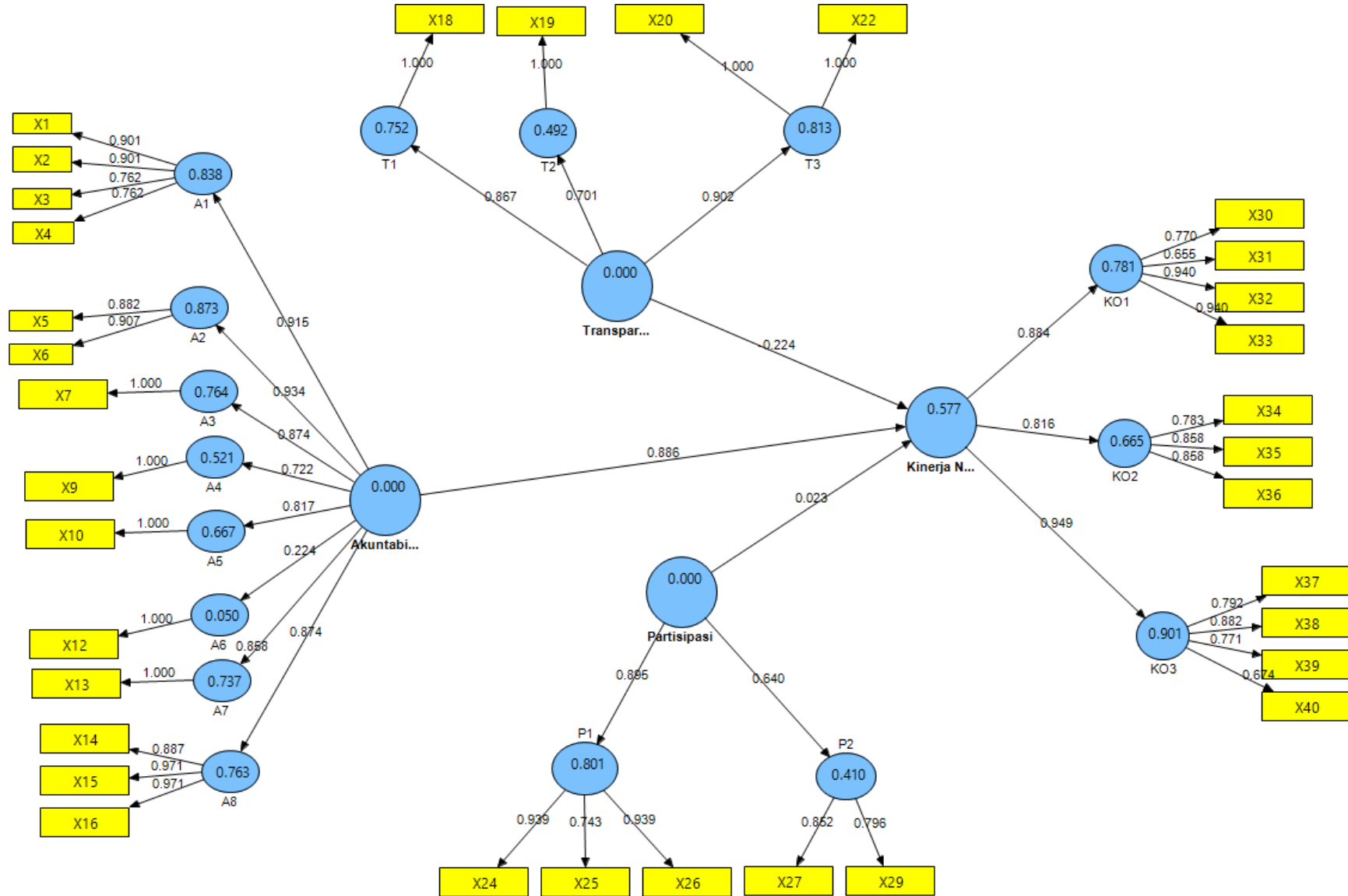
LAMPIRAN 3

Model Struktural sebelum modifikasi



LAMPIRAN 4

Model Struktural Setelah Modifikasi



LAMPIRAN 5

Tabulasi Data

No.	Akuntabilitas																
	X1	X2	X3	X4	X5	X28	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16
1	3	3	5	5	5	1	3	5	2	4	4	1	4	4	3	3	3
2	4	4	4	4	4	3	4	5	1	4	5	4	4	5	4	5	5
3	4	4	4	4	4	2	3	4	2	3	4	2	4	4	3	3	3
4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	5	4	4	4	5	4	4
5	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
6	5	5	5	5	4	1	5	5	1	5	5	3	3	5	4	4	4
7	4	4	3	3	4	1	4	5	3	5	4	2	2	5	4	3	3
8	4	4	2	2	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	2	2
9	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	3	5	5	5	4	4
10	4	4	4	4	3	2	4	4	3	4	4	2	4	3	4	4	4
11	3	3	5	5	3	1	3	5	1	4	4	1	4	4	3	3	3
12	4	4	4	4	4	3	4	5	1	4	5	4	4	5	4	5	5
13	4	4	4	4	4	2	3	4	3	3	4	2	4	4	3	3	3
14	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	5	4	4	4	5	4	4
15	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	5	5	5	5	4	1	5	5	1	5	5	3	3	5	4	4	4
17	4	4	3	3	4	1	4	5	2	5	4	2	2	5	4	3	3
18	4	4	4	4	3	4	3	3	2	4	4	4	4	3	3	2	2
19	5	5	5	5	4	5	4	5	3	5	4	3	5	5	5	4	4
20	4	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	2	4	3	4	4	4
21	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	2	4	3	4	4	4
22	3	3	5	5	4	1	3	5	2	4	4	1	4	4	3	3	3
23	4	4	4	4	5	3	4	5	2	4	5	4	4	5	4	5	5
24	4	4	4	4	5	2	3	4	1	3	4	2	4	4	3	3	3
25	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	5	4	4	4	5	4	4
26	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
27	5	5	5	5	5	1	5	5	1	5	5	3	3	5	4	4	4
28	4	4	3	3	4	1	4	5	1	5	4	2	2	5	4	3	3
29	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	4	3	3	2	2
30	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	4	3	5	5	5	4	4
31	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	2	4	3	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	1	4	4	3	3
33	4	4	2	2	4	4	4	4	4	3	4	2	2	4	4	3	3
34	2	2	5	5	2	5	2	2	2	4	3	3	1	2	2	2	2
35	3	3	1	1	3	1	3	3	4	1	1	3	4	3	3	4	4
36	3	3	4	4	3	5	3	3	5	3	2	3	4	3	3	2	2
37	3	3	2	2	3	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	3	3
38	2	2	2	2	2	4	2	2	2	3	3	3	4	2	2	1	1
39	2	2	3	3	2	5	2	2	4	2	1	2	3	2	2	1	1
40	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2

Transparansi							Partisipasi				
X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	X29
2	3	3	4	2	4	3	3	4	3	3	3
3	5	4	4	4	4	4	5	4	4	3	3
2	4	3	4	2	4	3	4	4	4	2	5
3	4	4	4	3	4	4	5	4	4	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	5	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4
3	3	4	2	3	2	4	3	3	3	4	4
3	4	3	4	4	4	3	2	2	2	3	3
2	5	5	5	4	5	5	4	5	4	3	5
3	5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4
5	3	3	4	2	4	3	3	4	3	4	5
3	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	3
5	4	3	4	2	4	3	4	4	4	3	4
4	4	4	4	3	4	4	5	4	5	3	3
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	5	4	3	3	3	4	3	4	3	5	5
4	3	4	2	3	2	4	3	3	3	4	4
5	4	3	4	4	4	3	2	2	2	4	3
3	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4
5	5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4
3	5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4
4	3	3	4	2	4	3	3	4	3	3	3
3	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4
3	4	3	4	2	4	3	4	4	4	3	3
3	4	4	4	3	4	4	5	4	5	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	3	3	3	4	3	4	3	5	5
4	3	4	2	3	2	4	3	3	3	3	3
2	4	3	4	4	4	3	2	2	2	3	3
2	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5
4	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	2	2	3	1	3	3	3	1	3	2	4
4	4	2	3	4	3	2	4	3	4	4	2
2	4	3	2	4	2	4	3	3	3	4	5
3	4	4	4	2	4	2	2	4	2	2	1
3	4	3	2	4	2	3	4	2	4	4	5
3	5	4	3	5	3	5	5	4	5	5	2
2	1	2	1	4	1	3	4	1	4	2	2
2	1	4	1	4	1	4	2	1	2	3	3
3	1	3	2	4	2	4	4	3	4	3	2

Kinerja NGO										
X30	X31	X32	X33	X34	X35	X36	X37	X38	X39	X40
3	4	3	3	4	5	5	3	4	3	3
5	3	4	4	5	4	4	5	4	4	5
3	4	3	3	3	5	5	3	3	5	3
4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4
4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5
4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
3	2	4	4	5	4	4	2	4	4	4
4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5
4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3
3	4	3	3	4	5	5	3	4	3	3
5	3	4	4	5	4	4	5	4	4	5
3	4	3	3	3	5	5	3	3	5	3
4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4
4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5
4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
3	2	4	4	5	4	4	2	4	4	4
4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5
4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3
4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3
3	4	3	3	4	5	5	3	4	3	3
5	3	4	4	5	4	4	5	4	4	5
3	4	3	3	3	5	5	3	3	5	3
4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4
4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5
4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
3	2	4	4	5	4	4	2	4	4	4
4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5
4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3
2	3	2	2	3	4	4	4	3	3	3
3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	4	4	4	3	2	2	2	2	3	3
3	1	1	1	1	4	4	2	3	1	5
5	4	5	5	5	5	5	5	4	3	2
2	2	2	2	2	4	4	1	3	4	4
3	4	3	3	2	4	4	4	3	4	1
4	3	2	2	4	5	5	5	4	4	1
2	4	3	3	2	1	1	1	1	3	3

LAMPIRAN 6

Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Commuality	Redundancy
A1	0.69604	0.900948	0.83759	0.85896	0.696042	0.568408
A2	0.80011	0.888939	0.87301	0.75087	0.80011	0.696159
A3	1	1	0.76437	1	1	0.76437
A4	1	1	0.52067	1	1	0.520665
A5	1	1	0.66719	1	1	0.667191
A6	1	1	0.05028	1	1	0.05028
A7	1	1	0.7366	1	1	0.736603
A8	0.89123	0.960845	0.76331	0.938016	0.891234	0.675706
Akuntabilitas	0.56759	0.947486		0.936004	0.567593	
KO1	0.6977	0.900388	0.78126	0.848358	0.697698	0.528732
KO2	0.69479	0.872076	0.66536	0.797587	0.694794	0.386824
KO3	0.61334	0.862794	0.90097	0.787881	0.613341	0.547375
Kinerja NGO	0.51102	0.917247	0.57738	0.897891	0.511024	0.268993
P1	0.77205	0.909489	0.80055	0.845192	0.772049	0.608512
P2	0.67996	0.809316	0.40977	0.531233	0.679957	0.277808
Partisipasi	0.57926	0.816261		0.710315	0.479261	
T1	1	1	0.75193	1	1	0.751928
T2	1	1	0.49179	1	1	0.491788
T3	1	1	0.81284	1	1	0.812838
Transparansi	0.71735	0.909537		0.86431	0.717348	

LAMPIRAN 7

Outer Loading

	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	Akuntabilitas	KO1	KO2	KO3	Kinerja NGO	P1	P2	Partisipasi	T1	T2	T3	Transparansi
X1	0.90115																			
X1									0.89188											
X10					1															
X10									0.816818											
X11									0.208171											
X12									0.224231											
X12						1														
X13							1													
X13									0.858256											
X14								0.88741												
X14									0.842186											
X15								0.97114												
X15									0.813851											
X16									0.813851											
X16								0.97114												
X18																	1			
X18																				0.86714
X19																		1		
X19																				0.70128
X2									0.89188											
X2	0.90115																			
X20																				0.90158
X20																			1	
X22																				0.90158
X22																			1	
X24														0.9391						

LAMPIRAN 8

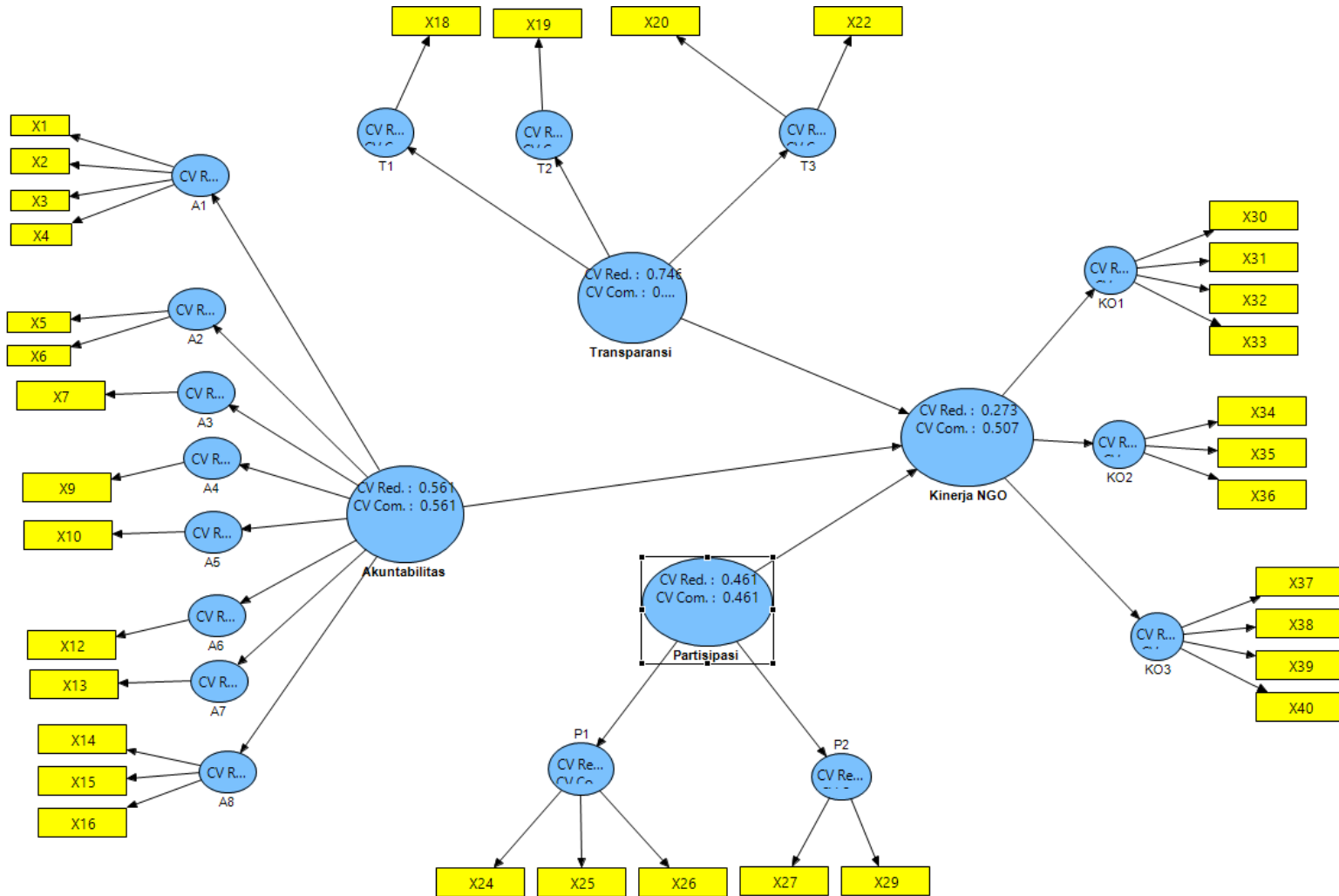
Total Effects (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
Akuntabilitas -> A1	0.915197	0.914569	0.022675	0.022675	40.360891
Akuntabilitas -> A2	0.934350	0.935524	0.019352	0.019352	48.282921
Akuntabilitas -> A3	0.874283	0.869414	0.045301	0.045301	19.299405
Akuntabilitas -> A4	0.721571	0.716343	0.077728	0.077728	9.283229
Akuntabilitas -> A5	0.816818	0.817475	0.048475	0.048475	16.850335
Akuntabilitas -> A6	0.224231	0.214242	0.171822	0.171822	1.305022
Akuntabilitas -> A7	0.858256	0.857361	0.042944	0.042944	19.985498
Akuntabilitas -> A8	0.873674	0.868768	0.049862	0.049862	17.521729
Akuntabilitas -> KO1	0.783440	0.755428	0.170879	0.170879	4.584757
Akuntabilitas -> KO2	0.722996	0.700602	0.163551	0.163551	4.420625
Akuntabilitas -> KO3	0.841325	0.808947	0.189497	0.189497	4.439769
Akuntabilitas -> Kinerja NGO	0.886354	0.850427	0.193505	0.193505	4.580526
Kinerja NGO -> KO1	0.883890	0.889396	0.032001	0.032001	27.620797
Kinerja NGO -> KO2	0.815696	0.823601	0.041665	0.041665	19.577686
Kinerja NGO -> KO3	0.949197	0.949680	0.018642	0.018642	50.917075
Partisipasi -> KO1	0.020018	0.029414	0.178470	0.178470	0.112167
Partisipasi -> KO2	0.018474	0.024770	0.165090	0.165090	0.111903
Partisipasi -> KO3	0.021498	0.026976	0.188967	0.188967	0.113764
Partisipasi -> Kinerja NGO	0.022648	0.030030	0.199959	0.199959	0.113264
Partisipasi -> P1	0.894735	0.898628	0.050269	0.050269	17.799093

Partisipasi -> P2	0.640134	0.644841	0.137519	0.137519	4.654864
Transparansi -> KO1	-0.198157	-0.170938	0.182346	0.182346	1.086708
Transparansi -> KO2	-0.182869	-0.157090	0.167100	0.167100	1.094369
Transparansi -> KO3	-0.212798	-0.180566	0.191784	0.191784	1.109572
Transparansi -> Kinerja NGO	-0.224188	-0.190854	0.203305	0.203305	1.102714
Transparansi -> T1	0.867138	0.860785	0.043245	0.043245	20.051521
Transparansi -> T2	0.701276	0.691815	0.112049	0.112049	6.258671
Transparansi -> T3	0.901575	0.896371	0.036010	0.036010	25.037102

LAMPIRAN 9

Blindfolding



RIWAYAT HIDUP



KEMAL SUPRIANDI, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 1991 adalah anak kedua dari 2 bersaudara, pasangan Hazali Marwan dan Elka Gustinawati.

Bertempat tinggal di Jl. Salak IV No. 20, Harapan Baru, Bekasi Barat, Bekasi.

Pendidikan formal yang ditempuh, TK Al-Husnayain (1996-1997), SDN Kota Baru IX Bekasi (1997 - 2003); SMPN 172 Jakarta (2003 - 2006); SMAN 11 Jakarta (2006 - 2009); Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi (2009-2013).

Penulis adalah orang yang aktif dalam kegiatan olahraga seperti futsal, basket, band, dan soccer. Kemudian di bangku perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan kepanitiaan seperti panitia MPA Akuntansi FE UNJ, panitia PKMJ Akuntansi FE UNJ. Penulis juga aktif dalam organisasi Econochannel pada tahun 2010-2011.